

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2021 – 2024)



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Mazaya Nabila Erwin

40011421650333

PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)

AKUNTANSI PERPAJAKAN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Mazaya Nabila Erwin
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650333
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola
Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi
Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024).

Semarang, 7 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak.

NIP. 199209302020122017

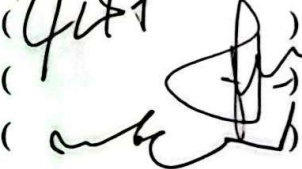
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mazaya Nabila Erwin
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650333
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola
Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi
Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024).

Telah Dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Juli 2025

Tim Penguji:

1. Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak.
2. Rissa Anandita, S.E., M.Ak., Ak., CA.
3. Ibnu Muttaqin, S.Pd., M.Si

()
()
()

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

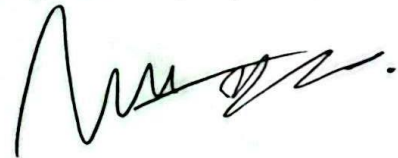
Yang bertanda tangan di bawah ini saya Mazaya Nabila Erwin, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul: Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024) yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (SI Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Mazaya Nabila Erwin

NIM. 40011421650333

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Variabel tata kelola perusahaan yang diteliti meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan afiliasi auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, beberapa aspek tata kelola perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini memberikan implikasi bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan, khususnya yang memiliki koneksi politik kuat dan tata kelola perusahaan yang kurang optimal.

Kata kunci: koneksi politik, tata kelola perusahaan, agresivitas pajak, sektor energi, Bursa Efek Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of political connections and corporate governance on tax aggressiveness in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021–2024. The corporate governance variables examined include board independence, board size, CEO duality, institutional ownership, and external auditor affiliation. This research uses a quantitative approach with secondary data obtained from annual reports and financial statements of the companies. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results show that political connections have a negative effect on tax aggressiveness. However, several aspects of corporate governance do not show any effect on tax aggressiveness. These findings provide implications for regulators and stakeholders to enhance supervision of corporate tax practices, especially for companies with strong political connections and less optimal corporate governance.

Keywords: political connections, corporate governance, tax aggressiveness, energy sector, Indonesia Stock Exchange

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridhonya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat kelulusan dari Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menjalankan studi dan penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan selama proses studi hingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Apip. S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, dan memberikan masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi secara sabar dengan penuh dedikasi selama proses penyusunan tugas akhir ini. Segala masukan dan ilmu yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Drs. Dul. Muid, M.Si., Akt, selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing dan mendampingi penulis sejak awal masa studi hingga akhir, serta memberikan arahan selama menempun perkuliahan di lingkungan kampus.
6. Seluruh dosen D4 Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa studi penulis. Ilmu yang telah diberikan menjadi bekal penting dalam penyusunan tugas akhir ini maupun di masa mendatang.
7. Erwin Perdana Kusuma dan Herlina selaku orang tua penulis tercinta yang selalu melafalkan nama penulis dalam doa, memberikan dukungan moral, menunjukkan keyakinan kinerja penulis, dan kesabaran untuk selalu menguatkan penulis serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Diri penulis sendiri yang telah bertahan sekuat tenaga, bertahan dalam tekanan, dan terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun lelah, terus berusaha meski tak selalu terlihat aslinya, dan tetap percaya meski sering ragu.

9. Najmi Haifa Erwin selaku Adik penulis yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir ini. Meski tak selalu tampak, tetapi kehadirannya sangat berarti dan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Khalisa Putri Fadillah selaku sahabat perjuangan penulis di perantauan yang selalu menemani penulis di setiap proses dan dengan sabar memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih atas segala bentuk dukungan di tengah lelah, pelukan saat runtuh, dan kalimat motivasi yang tak pernah gagal membuat penulis kembali bangkit.
11. Sahabat – sahabat Rawr, yaitu Ila Putri Aulia, Yulinar Indarti Marbun, Khalisa Putri Fadillah, Nadila Sonia Putri, Azkia Nayla Alya, dan Laila Aurelita yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang serta memberikan dorongan untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih telah tumbuh dan bertahan bersama dalam perjalanan ini.
12. Keluarga besar penulis yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber semangat di setiap langkah. Terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan serta menguatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Andrea Deflin selaku sahabat penulis yang tidak ada hentinya memberikan doa dan semangat untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih telah bertahan di segala situasi, tumbuh bersama,

mendampingi di setiap fase kehidupan yang menjadi penguat tak tergantikan dalam perjalanan panjang ini.

14. Nafalla selaku mentor yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Meskipun proses pendampingan dilakukan dari jarak jauh, tetapi saudara tetap menunjukkan komitmen, ketelitian, dan perhatian yang tinggi dalam mendampingi.
15. Syahla Nur Rahimah dan Rizky Alya Anisha selaku kakak tingkat yang telah memberikan semangat dan perhatian yang menjadi motivasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penulisan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sepadan.
16. Teman – teman kelas F Akuntansi Perpajakan Angkatan 2021 yang mewarnai hari penulis selama masa perkuliahan dan memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan kewajiban tugas akhir ini. Kerja sama, saling membantu, dan rasa solidaritas yang terjalin telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Penulis mengucapkan terima kasih bagi pihak – pihak tersebut atas kritik, saran, dan masukan terhadap tugas akhir ini dan penulis sendiri.

Semarang, 7 Juli 2025



Mazaya Nabila Erwin

NIM. 40011421650333

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 Landasan Teori.....	10
2.1.2 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
2.3 Hipotesis	25
2.3.1 Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak.....	25
2.3.2 Independensi Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak.....	28
2.3.3 Ukuran Dewan dan Agresivitas Pajak.....	29
2.3.4 Dualitas CEO dan Agresivitas Pajak.....	30
2.3.5 Investor Institusi dan Agresivitas Pajak.....	31
2.3.6 Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Definisi Operasional Variabel	32
3.1.1 Variabel Dependen (Y)	32

3.1.2	Variabel Independen (X)	33
3.1.3	Variabel Kontrol	37
3.2	Populasi dan Sampel	39
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	40
3.4	Metode Pengumpulan Data	40
3.5	Metode Analisis	41
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.5.2	Analisis Regresi	41
BAB IV	PEMBAHASAN.....	46
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2	Analisis Data	47
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	48
4.2.2	Analisis Regresi	52
4.3	Interpretasi Hasil	71
4.3.1	Koneksi Politik Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak... 72	
4.3.2	Independensi Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak..... 73	
4.3.3	Ukuran Dewan Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.. 73	
4.3.4	Dualitas CEO Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak 74	
4.3.5	Investor Institusi Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak 75	
4.3.6	Auditor Eksternal Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak 75	
BAB V	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan	76
5.3	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel	46
Tabel 4. 2 Sampel Perusahaan	47
Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. 4 Analisis Regresi	52
Tabel 4. 5 Uji Normalitas Sebelum Transformasi dan Outlier	55
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas Sebelum Transformasi dan Outlier.....	57
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi dan Outlier	58
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas Sebelum Transformasi dan Outlier	59
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	60
Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi.....	64
Tabel 4. 12 Uji Heteroskedastisitas.....	65
Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4. 14 Uji Signifikan Simultan	67
Tabel 4. 15 Uji Signifikan Parameter Individual	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Grafik Histogram Sebelum Transformasi dan Outlier	56
Gambar 4. 2 Grafik Normal Probability Plot Sebelum Transformasi dan Outlier	56
Gambar 4. 3 Grafik Histogram.....	61
Gambar 4. 4 Grafik Normal Probability Plot	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian	81
Lampiran 2 Tabulasi Data Agresivitas Pajak.....	84
Lampiran 3 Tabulasi Data Koneksi Politik.....	86
Lampiran 4 Tabulasi Data Independensi Dewan Komisaris.....	88
Lampiran 5 Tabulasi Data Ukuran Direksi	90
Lampiran 6 Tabulasi Data Dualitas CEO.....	92
Lampiran 7 Tabulasi Data Investor Institusi.....	94
Lampiran 8 Tabulasi Data Auditor Eksternal	96
Lampiran 9 Tabulasi Data Total Aset	98
Lampiran 10 Tabulasi Data Leverage	100
Lampiran 11 Tabulasi Market to Book Value.....	102
Lampiran 12 Hasil Uji Statistik dengan SPSS	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak secara konsisten menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap periode anggaran tahunan (Rosidy & Nugroho, 2019). Pajak di Indonesia digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, setiap warga negara wajib patuh memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kontribusi pajak bagi suatu negara sangat dibutuhkan karena dana yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembangunan tidak sedikit, khususnya di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang. Pemerintah Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pelaksanaan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang lebih menyeluruh (Iswari et al., 2019). Reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam hal peraturan perundang – undangan.

Namun, perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah – rendahnya atau dengan kata lain akan muncul tindakan agresivitas pajak. Iswari et al. (2019) mengatakan bahwa pajak perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan laba bersih atau sebagai

perpindahan kekayaan kepada pemegang saham perusahaan. Putri (2018) menambahkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi dan metode penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berbagai kasus agresivitas pajak mendorong penelitian untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai faktor apa yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Duke & Trisnawati (2025) mengatakan agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui penerapan strategi perpajakan dan pemanfaatan celah hukum yang tersedia. Strategi agresivitas pajak telah digunakan oleh perusahaan berskala besar maupun kecil yang menimbulkan sejumlah masalah seperti berkurangnya pendapatan negara, risiko sanksi hukum, reputasi buruk perusahaan, dan mengaburkan transparansi laporan keuangan. Beberapa tindakan dianggap tidak menyalahi aturan, tetapi banyak taktik yang digunakan diasumsikan lebih agresif karena mengganggu tujuan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menerapkan berbagai taktik untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak fiskal mencerminkan tingkat agresivitasnya dalam menghadapi kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Khayati et al., 2024).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Pada negara Indonesia, koneksi politik umumnya terbentuk melalui penunjukan individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah ke dalam struktur perusahaan, baik sebagai komisaris maupun direksi

(Putri, 2018). Risiko pemeriksaan yang dihadapi oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik tentu lebih mudah karena mendapat perlindungan. Dalam hal ini, pemegang saham akan merasa kurang puas dengan kinerja perusahaan yang kurang transparan atas laporan keuangannya. Koneksi politik memberikan kemudahan perusahaan dalam memperoleh akses terhadap informasi mengenai perubahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan di masa mendatang (Iswari et al., 2019).

Koneksi politik di Indonesia tampak sering terjadi melalui penempatan individu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, telah terjadi sejumlah pengangkatan dan pergantian komisaris BUMN yang melibatkan individu – individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan (Wicaksono, 2017). Koneksi politik terlihat jelas pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana sejumlah komisaris BUMN yang diangkat berasal dari partai politik maupun relawan pendukung untuk menduduki posisi komisaris BUMN (Putri, 2018). Pengangkatan komisaris di BUMN mencerminkan bahwa praktik koneksi politik merupakan hal yang lazim dalam struktur organisasi BUMN di Indonesia.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah tata kelola perusahaan, seperti yang dikatakan Wahab et al. (2017) bahwa struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam menentukan cara pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi menimbulkan konflik keagenan karena

kepentingan antara pemegang saham dan manajer tidak sejalan mengenai risiko yang timbul dari pengelolaan pajak (Wahab et al., 2017). Desai & Dharmapala (2006) mengatakan bahwa manajer dapat mengambil manfaat dari agresivitas pajak dengan menyembunyikan sebagian keuntungan yang diperoleh melalui strategi perencanaan pajak. Pemegang saham umumnya mengharapkan manajer atau direktur bertindak demi kepentingan mereka dengan berfokus pada peningkatan keuntungan, termasuk upaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan berperan penting dalam menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Fenomena praktik agresivitas pajak beberapa kali ditemukan di Indonesia oleh beberapa perusahaan. Khayati et al. (2024) menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk (ADRO) merupakan salah satu perusahaan yang diketahui melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut laporan *Global Wirness* pada 4 Juli 2019 dengan judul *Adaro Moves Hundreds of Millions of Dollars into Growing Offshore Network*, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017 PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *transfer pricing* dan pengalihan laba (*profit shifting*) perusahaan melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk menjual batubara dengan harga lebih rendah ke Coaltrade di Singapura yang kemudian dijual kembali dengan harga pasar yang lebih tinggi ke pasar internasional. Laba hasil selisih dibukukan di Singapura dengan tingkat pajak yang jauh lebih rendah dari Indonesia. PT Adaro Energy Tbk telah mengatur strategi pajak mereka sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dollar AS lebih rendah daripada yang seharusnya mereka bayarkan.

Dugaan praktik lainnya dilakukan juga oleh sebuah perusahaan energi dan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia dianggap melakukan agresivitas pajak dalam jumlah miliaran dollar Amerika Serikat pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport mencapai kesepakatan sebagai hasil dari proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak berlarut – larut. Dalam kesepakatan tersebut, PT Freeport menyetujui pembayaran pajak tambahan sebesar \$1,3 miliar dan melakukan perubahan dalam kebijakan perpajakannya (Duke & Trisnawati, 2025).

Perusahaan di sektor energi memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional dan lonjakan harga komoditas yang signifikan memberikan keuntungan besar bagi beberapa perusahaan di sektor ini sehingga membuka peluang bagi perusahaan sektor energi untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif guna mengurangi beban pajak (Oktavia et al., 2023). Monica et al. (2022) mengatakan bahwa sektor energi merupakan salah satu penggerak utama kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di mana harga saham sektor ini mencatat level tertinggi dibandingkan dengan sebelas sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan – perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2024 dijadikan sampel dalam penelitian ini karena mempunyai perbedaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang biasanya menggunakan sampel sektor lain.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini menganalisis **“Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak” (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024)**. Tata kelola perusahaan meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, investor institusi, dan auditor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan dengan aktivitas agresivitas pajak sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus agresivitas pajak sering kali dilakukan oleh perusahaan di Indonesia maupun di lingkup multinasional. Pada negara – negara berkembang banyak kasus agresivitas pajak sering terjadi sehingga menimbulkan deviasi atau perbedaan antara target pajak yang direncanakan dan realisasinya (Putri, 2018). Agresivitas pajak merujuk pada upaya menghindari pajak terutang secara legal dan aman tanpa melanggar peraturan perpajakan serta tetap menyampaikan informasi secara transparan kepada otoritas pajak (Wicaksono, 2017).

Suatu perusahaan memiliki strategi perpajakannya masing – masing dalam merancang agresivitas pajak. Agresivitas pajak memberikan manfaat dan kerugian tersendiri bagi suatu perusahaan. Lestari et al. (2019) menjelaskan salah satu manfaat dari agresivitas pajak adalah penghematan pembayaran pajak yang dapat meningkatkan laba dan digunakan untuk membiayai investasi perusahaan di masa depan. Lestari et al. (2019) menambahkan perusahaan yang bersikap agresif terhadap pajak juga berisiko mengalami kerugian, seperti dikenai denda oleh

otoritas pajak dan penurunan harga saham karena pemegang saham lain mengetahui praktik agresivitas pajak yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan latar belakang masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
4. Apakah dualitas CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
5. Apakah investor institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
6. Apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.

2. Untuk menganalisis apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
3. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
4. Untuk menganalisis apakah dualitas CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
5. Untuk menganalisis apakah investor institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
6. Untuk menganalisis apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur ilmu pengetahuan dalam perpajakan khususnya di bidang agresivitas pajak.

2. Aspek Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan integritas pasar modal di Indonesia.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan bidang politik dan tata kelola perusahaan.

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan baru dan referensi kepada penelitian selanjutnya mengenai koneksi politik, tata kelola perusahaan, dan agresivitas pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I menguraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, penjelasan mengenai kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan mengenai variabel – variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang diambil, jenis dan sumber data penelitian dengan metode pengumpulan datanya, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV menerangkan uraian mengenai objek penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan atau inteepretasi hasil dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

BAB V memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang ada dari hasil penelitian, dan saran yang dapat diberikan mengenai hasil penelitian untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menyoroti hubungan antara pemegang saham dan manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Jensen & Meckling (1976) mengatakan teori agensi merupakan sebuah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal akan menugaskan agen untuk melakukan suatu pekerjaan dan otoritas pengambilan keputusan atas nama prinsipal. Duke & Trisnawati (2025) menjelaskan bahwa teori agensi dianggap sebagai teori yang paling tepat untuk menggambarkan agresivitas pajak karena teori ini mampu menjelaskan hubungan antara prinsipal yang diwakili oleh pemilik perusahaan dengan agen yang diwakili manajer perusahaan. Wicaksono (2017) juga menambahkan, dalam rangka mewujudkan kontrak kerja tersebut maka para pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menjalankan kebutuhan operasional perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan manajer adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan untuk kemakmuran pemegang saham.

Pemisahan antara pemilik dan pihak manajemen perusahaan berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah risiko manajer bertindak tidak sesuai dengan tujuan atau kepentingan pemilik (Putri, 2018). Perbedaan

kepentingan tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi atau insentif sebesar – besarnya dengan menunjukkan laba yang tinggi dari kinerjanya, sedangkan pemilik perusahaan yang dalam hal ini digambarkan pemegang saham cenderung ingin meminimalkan beban pajak dengan melaporkan laba yang rendah (Putri, 2018).

Teori ini mengemukakan bahwa pemilik perusahaan memberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan mereka kepada manajer. Menurut teori keagenan, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keagenan adalah dengan mengarahkan agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui pemberian kompensasi atau bentuk imbalan lainnya (Rosidy & Nugroho, 2019). Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik yang mengharapkan pengelolaan perusahaan secara optimal untuk meningkatkan keuntungan dengan manajer yang lebih berfokus pada memperoleh keuntungan pribadi sebagai bentuk kepentingan sendiri.

2.1.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Agresivitas pajak merujuk pada upaya pengelolaan penghasilan kena pajak (*taxable income*) melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan baik secara legal maupun illegal (Frank et al., 2008). Agresivitas pajak mengarah pada strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan

serta pengungkapan informasi yang lengkap kepada otoritas pajak (Wicaksono, 2017). Praktik agresivitas pajak sering kali dilakukan dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak sehingga tercermin dalam rendahnya tarif pajak efektif. Oleh karena itu, tarif pajak efektif yang lebih rendah dapat mencerminkan strategi manajerial dalam memanfaatkan celah kebijakan fiskal secara legal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Praktik agresivitas pajak mencakup penggunaan berbagai teknik, seperti *transfer pricing*, pengalihan laba, dan pemanfaatan celah hukum yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Efisiensi pajak yang dilakukan dianggap sebagai praktik yang legal tetapi kurang etis (Sofiati & Zulaikha, 2018). Selain itu, Sofiati & Zulaikha (2018) menambahkan bahwa upaya efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi penerimaan negara sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional karena dana yang tersedia untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan menjadi kurang. Agresivitas pajak dalam hal ini dapat mencerminkan tindakan perusahaan yang melewati efisiensi pajak biasa sehingga masuk ke ranah perencanaan yang lebih agresif, legal maupun *bonderline* ilegal.

Meskipun perencanaan pajak adalah praktik yang legal, beberapa strategi dapat melibatkan penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara nantinya. Pendekatan dan teknik yang digunakan umumnya memanfaatkan celah atau *grey area* dalam undang – undang dan peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar ketentuan hukum pajak (Wicaksono, 2017). Meskipun tidak semua

tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, berbagai metode yang diterapkan oleh perusahaan sering kali menimbulkan anggapan bahwa perusahaan bersikap lebih agresif dalam hal perpajakan (Lestari et al., 2019).

2.1.1.3 Koneksi Politik

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang menjalin hubungan khusus dengan pemerintah atau mantan pejabat pemerintah yang dapat mendorong terjadinya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik sendiri merupakan relasi antara pihak tertentu dengan aktor politik untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh perlindungan dari pemerintah dan menghadapi risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah sehingga mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat transparansi laporan keuangan (Butje & Tjondro, 2014).

Wicaksono (2017) mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi potensi terdeteksinya praktik agresif pajak karena politisi cenderung memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki koneksi dengan mereka sehingga risiko terkait agresivitas pajak menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan agar perusahaan memperoleh informasi yang lebih akurat terkait perubahan regulasi perpajakan di masa depan. Koneksi politik juga dapat mengurangi tekanan dari pasar modal untuk bersikap transparan dan menurunkan biaya politik yang berkaitan dengan perencanaan pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

2.1.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan mencakup mekanisme yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku manajerial. Praktik tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab secara tegas antara pimpinan dan CEO guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak (Wahab et al., 2017). Penggabungan peran dalam perusahaan masih diperkenankan dengan syarat harus terdapat independen yang kuat dalam dewan dan alasan dibalik penggabungan tersebut dijabarkan secara transparan (Wahab et al., 2017).

Struktur dewan direksi, kepemilikan institusional, dan independensi dewan adalah faktor penting yang mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak karena status nya yang merupakan wajib pajak badan. Sofiati & Zulaikha (2018) menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mencari cara untuk menekankan kewajibannya karena pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Karakteristik tata kelola perusahaan yang kompleks menjadikan analisis hubungan antara struktur tata kelola dan agresivitas pajak sebagai suatu bidang penelitian yang menantang (Halioui et al., 2016). Mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola pajaknya. Wahab et al. (2017) berpandangan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dan menguntungkan dapat

mencegah perusahaan dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang bersifat agresif.

Mekanisme tata kelola perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu tata kelola internal dan tata eksternal. Sejalan dengan pandangan bahwa strategi perpajakan merupakan tanggung jawab dewan maka penelitian ini mengeksplorasi pengaruh tata kelola internal perusahaan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Wahab et al. (2017) mengemukakan bahwa pengawasan eksternal dibutuhkan guna menekan biaya keagenan yang muncul akibat keputusan terkait perpajakan.

Mekanisme tata kelola internal terdiri dari independensi dewan, dewan direksi, dan dualitas CEO (Wahab et al., 2017). Independensi dewan, khususnya komisaris independen dapat menjalankan tugas pengawasan secara objek dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan manajemen atau pemegang saham. Selanjutnya, dualitas CEO menandakan bahwa terdapat penggabungan posisi CEO dengan ketua dewan direksi. Ketika satu individu memegang dua posisi penting dalam dewan, terdapat potensi dia menyembunyikan informasi yang merugikan dari pihak eksternal dan bertindak secara oportunistik demi kepentingan pribadi (Wahab et al., 2017). Salah satu mekanisme internal lainnya adalah ukuran dewan direksi yang sering dijadikan sebagai indikator keahlian para anggota dewan (Wahab et al., 2017). Oleh karena itu, direksi dengan jumlah anggota yang lebih banyak dianggap dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal.

Mekanisme tata kelola eksternal mengacu kepada keterlibatan investor institusi dan auditor eksternal yang memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan (Wahab et al., 2017). Investor institusi atau kepemilikan oleh institusi cenderung kurang memberi perhatian pada kebijakan perencanaan pajak perusahaan, melainkan lebih terfokus pada insentif yang diperoleh dari laba perusahaan (Putri, 2018). Situasi ini mendorong kecenderungan untuk melakukan manajemen laba daripada menerapkan praktik agresivitas pajak. Kemudian, peran auditor eksternal berkaitan dengan proses audit independen terhadap laporan keuangan yang sejak lama dianggap berfungsi sebagai mekanisme penjaminan atas kredibilitas informasi yang disampaikan oleh manajemen, meskipun dalam batas tertentu (Wahab et al., 2017). Perusahaan yang diaudit oleh perusahaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, khususnya dalam aspek perpajakan.

Mekanisme tata kelola perusahaan, baik internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dapat mencegah timbulnya permasalahan perpajakan, termasuk tindakan agresivitas pajak. Selanjutnya, Wahab et al. (2017) menambahkan bahwa mekanisme tata kelola eksternal yang melibatkan peran pengawasan oleh investor institusi dan auditor eksternal dapat membatasi tindakan oportunistik serta memberikan perlindungan terhadap pengambilan keuntungan pribadi oleh manajer yang berasal dari praktik agresivitas pajak.

2.1.1.5 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi maupun dewan komisaris dan tidak menduduki posisi direktur di perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan induk (Fadillah, 2017). Independensi dewan mengacu pada keadaan di mana anggota dewan harus bersikap independen dari pengaruh manajemen maupun pemegang saham utama (Wahab et al., 2017). Independensi dewan berfungsi untuk memantau manajer sehingga peningkatan independensi dewan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dewan dan menandakan praktik tata kelola yang baik.

Dewan komisaris independen yang efektif akan memastikan bahwa perusahaan menjalankan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin besar proporsi komisaris independen maka efektivitas pengawasan akan meningkat karena fungsi pemantauan terhadap kinerja manajemen dapat dilakukan secara lebih optimal (Yuliani & Prastiwi, 2021). Teori independensi dewan komisaris menegaskan pentingnya keberadaan anggota dewan yang terbebas dari pengaruh internal perusahaan untuk menjamin pengawasan yang efektif, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, dan melindungi kepentingan pemegang saham serta *stakeholder* secara luas.

2.1.1.6 Ukuran Dewan

Teori ukuran dewan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh jumlah anggota dewan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Ukuran dewan dalam tata kelola perusahaan dianggap sebagai salah satu indikator efektivitas pengawasan internal yang dapat memengaruhi perilaku manajemen, termasuk dalam agresivitas pajak. Mekanisme tata kelola perusahaan secara internal yang berhubungan dengan efektivitas peran dewan direksi bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perpajakan perusahaan selaras dengan pencapaian tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Wahab et al., 2017).

Ukuran dewan yang optimal akan mampu meningkatkan pengawasan yang efektif dan mengurangi risiko agresivitas pajak. Wahab et al. (2017) mengatakan bahwa dewan perlu mengevaluasi jumlah anggotanya guna memahami sejauh mana ukuran dewan memengaruhi efektivitas kinerjanya. Ukuran dewan yang besar berdampak negatif terhadap agresivitas pajak karena dapat meningkatkan pengawasan, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mengurangi peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif.

2.1.1.7 Dualitas CEO

Teori dualitas CEO menjelaskan peran ganda seorang individu yang menjabat sebagai CEO sekaligus ketua dewan dalam suatu perusahaan. Wahab et al. (2017) menyebutkan bahwa kehadiran dualitas CEO dalam suatu perusahaan mencerminkan lemahnya implementasi tata kelola perusahaan. Dalam konteks

agresivitas pajak, dualitas CEO bisa mempermudah praktik agresivitas pajak karena lemahnya pengawasan internal.

Nurlalila (2013) mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem dua tingkat (*two – tier system*) di mana dewan komisaris dan dewan direksi memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda serta tidak boleh dijabat oleh orang yang sama. Namun, saat ini terlihat beberapa perusahaan menerapkan sistem satu tingkat (*one – tier system*) yang menunjukkan adanya praktik rangkap jabatan di beberapa perusahaan di Indonesia. Larangan resmi terhadap praktik rangkap jabatan di Indonesia saat ini hanya secara eksplisit diatur untuk sektor perbankan dan BUMN, sedangkan larangan tersebut belum menyeluruh di seluruh sektor. Larangan tersebut yang diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 22 (1) serta Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 25 dan Pasal 33 (Nurlalila, 2013).

Dualitas CEO menjadi mekanisme tata kelola internal perusahaan yang sangat penting karena akan mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Menurut Zhou dalam penelitian Halioui et al. (2016) dualitas CEO dapat mempererat keterkaitan antara dewan dan tim eksekutif sehingga mempermudah penerapan strategi perpajakan yang agresif. Selain itu, keberadaan dualitas CEO dapat melemahkan fungsi dewan dalam tata kelola perusahaan karena memperparah konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Tidak hanya itu, Zhou dalam penelitian Halioui et al. (2016) mengatakan ketika kekuasaan terpusat pada satu pengambil keputusan atau tidak terdapat pemisahan peran dalam

kepemimpinan (Dualitas CEO) akan membuat anggota dewan cenderung kesulitan untuk menolak usulan strategi pajak dari perusahaan.

2.1.1.8 Investor Institusi

Teori investor institusi menggambarkan peran dan karakteristik investor institusional sebagai organisasi atau entitas yang mengelola dana milik pihak lain, seperti perusahaan, dana publik, atau kelompok anggota tertentu dengan tujuan investasi yang terencana dan terstruktur. Menurut Yuliani & Prastiwi (2021) investor institusi mampu mengawasi kinerja manajemen karena kepemilikan saham oleh institusi memberikan mereka peran dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Teori investor institusi menekankan bahwa keberadaan dan perilaku investor institusional sangat penting dalam tata kelola perusahaan karena membawa modal besar, pengawasan yang ketat, serta pendekatan investasi yang profesional.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham karena keberadaan investor institusi diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022). Hal ini akan memberikan investor institusi kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan, seperti tingkat kepatuhan pajak dalam menghindari agresivitas pajak. Manajemen tentu nya akan mendapat tekanan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang baik karena investor institusi akan menuntut laba tanpa ada nya masalah agresivitas pajak di kemudian hari.

2.1.1.9 Auditor Eksternal

Teori auditor eksternal dalam penelitian ini menyoroti peran auditor independen sebagai pengawas dari luar perusahaan yang berfungsi mengontrol tindakan manajemen terkait pelaporan pajak. Peran auditor eksternal berkaitan dengan pelaksanaan audit independen atas laporan keuangan yang secara historis dikaitkan dengan fungsi *assurance* dalam menjamin tingkat kredibilitas informasi yang disusun oleh manajemen, meskipun jaminan tersebut memiliki batasan tertentu (Wahab et al., 2017). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih kuat, khususnya dalam aspek perpajakan. Dalam konteks agresivitas pajak, auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu menekan potensi manipulasi laporan atau praktik penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

Penggunaan jasa auditor eksternal dari *Big Four* sering dikaitkan dengan pengawasan yang lebih ketat dan pelaporan pajak yang lebih patuh sehingga mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sulistyowati (2023) mengatakan tingginya kualitas audit dalam suatu perusahaan dapat menekan tingkat agresivitas pajak karena audit yang berkualitas mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Auditor eksternal dengan kredibilitas atau kualitas tinggi, khususnya yang berasal dari *Big Four*, umumnya melakukan pemeriksaan yang lebih ketat sehingga membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan agresif terkait pajak.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi untuk menunjang penelitian dan memperkuat kerangka berpikir. Beberapa penelitian tersebut antara lain.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	<i>Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia .</i>	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Akmalia Mohamad Ariff, Marziana Madah Marzuki, dan Zuraidah Mohd Sanusi (2017).	Koneksi politik berhubungan positif dan signifikan dengan agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan tidak melemahkan pengaruh tersebut.
2	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2016).	Siti Azizah Sofiati dan Zulaikha (2018).	Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan proporsi dewan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.
3	<i>Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100.</i>	Khamoussi Halioui, Souhir Neifar dan Fouad Ben Abdelaziz (2016).	Kualitas tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
4	<i>Political connection and tax aggressiveness: A study on the stateowned enterprises Registered in Indonesia stock exchange.</i>	Pipit Iswari, Eko Arief Sudaryono, dan Wahyu Widarjo (2019).	Koneksi politik (dewan direksi ataupun dewan komisaris) memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
5	Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).	Vidiyanna Rizal Putri (2018).	Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak.
6	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak.	Cahya Nur Andri Sulistyowati (2023).	Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kualitas audit terbukti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7	<i>Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.</i>	Chansog Kim dan Liandong Zhang (2014).	Terdapat bukti kuat bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

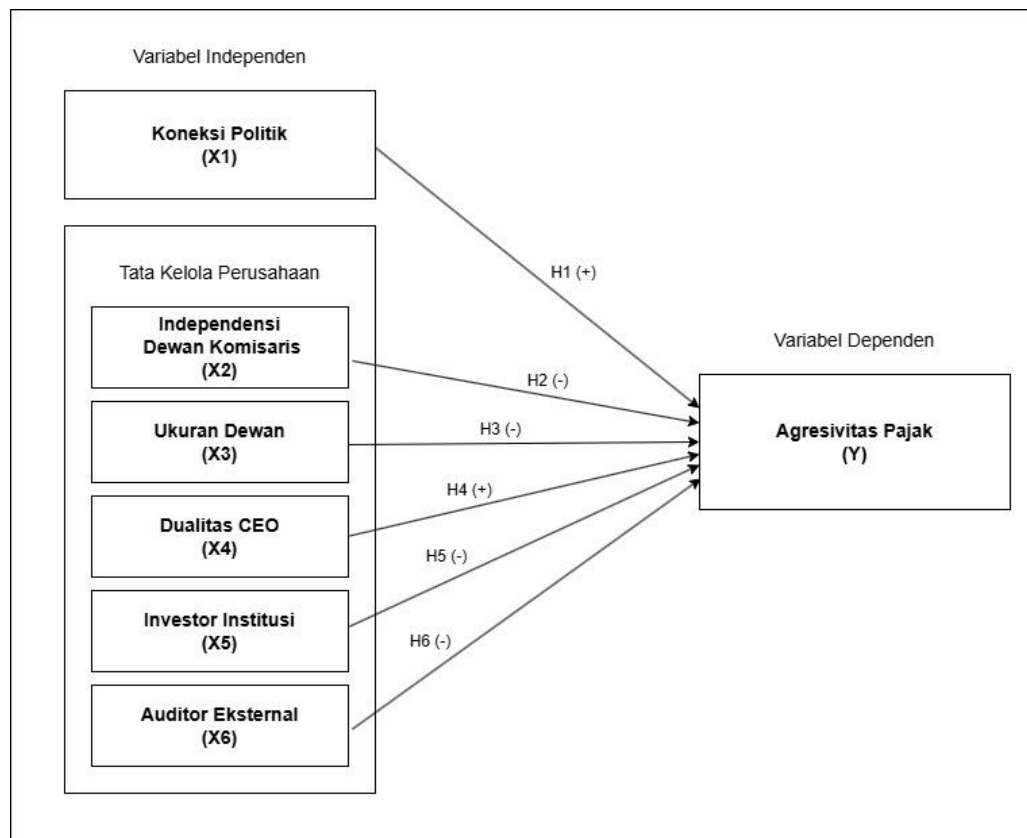
No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
8	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak	Nur Affah Yuliani dan Dewi Prastiwi (2021).	Dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh dalam menurunkan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional dapat menurunkan agresivitas pajak.
9	Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak.	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019).	Secara pengujian hipotesis secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan pengujian hipotesis secara parsial koneksi politik terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
10	Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia.	Agung Prasetyo Nughroho Wicaksono (2017).	Koneksi politik yang terjalin melalui hubungan dengan komisaris terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel – variabel yang ada dalam penelitian serta potensi dampaknya. Penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu koneksi politik dan tata kelola perusahaan. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan pada tinjauan pustaka di atas maka dapat

disusun penjelasan bagaimana koneksi politik dan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak melalui pemikiran penelitian berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menekankan hubungan antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan wewenang dan agen sebagai pihak yang menerima wewenang, di mana keduanya bekerja sama untuk saling memenuhi hak serta kewajiban masing – masing. Dalam praktiknya, prinsipal dan agen akan berusaha untuk meraih keuntungan dengan mementingkan kepentingan, termasuk memanfaatkan koneksi politik guna keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak. Koneksi

politik memiliki keterkaitan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana pemilik perusahaan sebagai pihak yang berupaya memaksimalkan kepentingannya cenderung memanfaatkan hubungan politik guna melakukan penghindaran pajak secara agresif (Faiziyah, 2020). Dalam hal ini, konflik bisa muncul meskipun prinsipal mengarahkan pemanfaatan koneksi politik untuk agresivitas pajak, tetapi pelaksanaan di lapangan oleh agen mungkin berbeda, terutama bila agen mengambil risiko yang lebih tinggi atau menggunakan koneksi tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan berbagai manfaat yang saling menguntungkan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung terlibat lebih jauh dalam perencanaan pajak yang berisiko karena adanya dorongan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi akibat pengaruh dari koneksi politik tersebut (Kim & Zhang, 2016). Hal ini memberikan kekuatan ke wajib pajak untuk memperoleh perlakuan yang lebih istimewa.

Koneksi politik kerap dimanfaatkan dalam dunia bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai peluang untuk mengelola kewajiban pajak dengan memanfaatkan kedekatan hubungan dengan pihak pemerintah. Salah satu dampak positif dari adanya koneksi politik adalah diperolehnya perlakuan istimewa dari pemerintah dalam aspek perpajakan, seperti kemudahan untuk terhindar dari proses audit pajak (Kim & Zhang, 2016). Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memanfaatkan hubungan ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai cara, baik legal maupun illegal.

Kim & Zhang (2016) menjelaskan alasan dibalik tingginya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki koneksi politik dibandingkan dengan yang tidak memiliki koneksi politik tersebut karena koneksi politik memberikan perlindungan dan peluang yang lebih besar dalam menjalankan strategi perpajakan yang agresif. Pertama, selama politisi memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik maka risiko terdeteksinya praktik perlindungan pajak cenderung lebih rendah. Kedua, koneksi politik memberi perusahaan akses terhadap informasi terkait perubahan regulasi dan penegakan perpajakan di masa mendatang sehingga perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan waktu secara lebih optimal. Ketiga, perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya menghadapi tekanan yang lebih ringan dari pasar modal dalam hal keterbukaan informasi. Keempat, koneksi politik berpotensi menurunkan beban biaya politik yang timbul sebagai konsekuensi dari kewajiban perpajakan. Kelima, koneksi politik dapat berkaitan dengan meningkatnya agresivitas pajak karena pengaruhnya dalam mendorong perusahaan untuk lebih berani mengambil risiko.

Wahab et al. (2017) menemukan jika koneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Putri (2018) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.2 Independensi Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, di mana prinsipal bertugas mengawasi tindakan agen agar tidak melakukan hal – hal yang merugikan, termasuk dalam aspek perpajakan. Dewan komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan internal diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan mengawasi manajemen agar tidak melakukan agresivitas pajak. Sulistyowati (2023) menerangkan bahwa pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen mendorong manajemen untuk bertindak lebih hati – hati dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dewan komisaris independen merupakan perwakilan perusahaan yang memonitor kinerja perusahaan dalam pengelolaan. Sulistyowati (2023) mengatakan bahwa tugas komisaris independen yang didukung oleh manajemen tingkat atas adalah mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan dan berperan dalam merumuskan strategi serta perencanaan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan, termasuk di dalamnya perencanaan pajak. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk berhati – hati dalam pengambilan keputusan dan lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

H2 : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Ukuran Dewan dan Agresivitas Pajak

Teori agensi muncul sebagai akibat dari pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Hamdani (2016) mengatakan bahwa dewan bertindak sebagai agen dalam perusahaan yang diberi wewenang untuk mengelola operasional serta membuat keputusan atas nama pemilik perusahaan. Ukuran dewan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan pemegang saham sehingga menurunkan kecenderungan manajemen melakukan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan keagenan.

Ukuran dewan direksi sering digunakan sebagai representasi dari kompetensi yang dimiliki oleh para anggotanya, di mana dewan yang lebih besar diasumsikan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja perusahaan (Wahab et al., 2017). Akan tetapi, menurut Halioui et al. (2016) dewan direksi yang berukuran kecil cenderung mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui mekanisme kontrol yang lebih efisien dan terfokus. Dewan yang berperan sebagai pengawas akan memonitor manajemen untuk melakukan tindakan sesuai kepentingan pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Halioui et al. (2016) mengasumsikan hubungan antara ukuran dewan dengan agresivitas pajak bersignifikan negatif.

H3 : Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.4 Dualitas CEO dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menguraikan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana konflik kepentingan muncul akibat perbedaan tujuan serta ketidakseimbangan informasi di antara keduanya. CEO sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat menguntungkan prinsipal, tetapi terkadang CEO gelap mata sehingga bertindak oportunis demi kepentingan diri sendiri. Wahab et al. (2017) mengatakan bahwa mekanisme dualitas CEO merujuk pada kondisi di mana satu individu menjabat sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) sekaligus ketua dewan direksi perusahaan. Teori keagenan muncul untuk memisahkan kedua peran tersebut menjadi satu kekuasaan guna menghindari perilaku oportunistik karena kurangnya efektivitas pengawasan.

Menurut teori agensi, pemisahan peran antara CEO (*Chief Executive Office*) dan ketua dewan direksi (*Chairman of The Board*) diperlukan untuk mencegah dominasi salah satu pihak atas dewan (Nurlalila, 2013). Wahab et al. (2017) menjelaskan ketika satu individu memegang dua posisi otoritatif dalam dewan, terdapat potensi untuk menyembunyikan informasi yang merugikan dari pihak eksternal serta bertindak oportunistik. Dalam perspektif teori agensi, berkurangnya pengawasan membuka peluang bagi CEO untuk membuat keputusan yang lebih agresif dalam perencanaan pajak, khususnya dalam menerapkan strategi agresivitas pajak guna menurunkan beban pajak perusahaan.

CEO yang memegang dualitas jabatan cenderung memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan sehingga mereka dapat mendorong agresivitas pajak yang lebih tinggi. Oleh karena

itu, strategi perpajakan yang bersifat agresif dapat disetujui dan diterapkan dengan lebih mudah (Halioui et al., 2016). Pengaruh positif dualitas CEO terhadap agresivitas pajak didukung oleh teori agensi yang menekankan pentingnya pemisahan antara peran pengawasan untuk mengurangi perilaku oportunistik.

H4 : Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.5 Investor Institusi dan Agresivitas Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan investor institusi sebagai prinsipal dapat meminimalkan konflik agensi melalui peningkatan pengawasan terhadap manajemen sebagai agen sehingga dapat mencegah tindakan oportunistik seperti agresivitas pajak. Putri (2018) menjelaskan bahwa kehadiran investor institusi dalam suatu perusahaan diyakini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan serta kinerja manajemen. Kehadiran investor institusi dapat mengurangi konflik agensi dengan memperkuat pengawasan manajemen melalui pemantauan aktif kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi lain atau lembaga, termasuk pemegang saham besar (*blockholder*) yang memiliki proporsi saham lebih dari 5% (Yuliani & Prastiwi, 2021). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin besar pula hak suara yang dimiliki investor sehingga meningkatkan kekuatan pengawasan terhadap manajemen dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pemegang saham institusional cenderung menghindari praktik agresivitas pajak karena mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi yang telah mereka

tanamkan di perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi berpotensi menekan tindakan agresif dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen.

H5: Investor institusi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.6 Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak

Teori agensi muncul ketika manajemen bertindak untuk meraih keuntungan demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemilik perusahaan, seperti dengan melakukan praktik agresivitas pajak untuk meningkatkan laba bersih jangka pendek atau mengurangi beban pajak secara berlebihan. Auditor eksternal yang bersifat independen cenderung akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam sehingga menekan manajemen sebagai agen untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Dalam penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2023) dikatakan bahwa kualitas audit dalam suatu perusahaan berperan dalam menekan tingkat agresivitas pajak karena auditor yang kompeten mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan.

Sulistyowati (2023) mengatakan auditor eksternal berkualitas, khususnya yang berafiliasi dengan firma *Big Four*, umumnya tidak menganjurkan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran apabila praktik tersebut terungkap oleh otoritas pajak maka reputasi auditor bisa tercoreng dan dianggap telah menyarankan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan pajak. Oleh karena itu, auditor eksternal yang berkualitas tinggi cenderung berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak karena kredibilitas dan reputasinya mendorong perusahaan untuk menghindari praktik perpajakan yang agresif.

H6 : Auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi dependen adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merujuk pada serangkaian strategi perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan beban atau kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Wahab et al., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari et al. (2019) dan Halioui et al. (2016), pengukuran variabel agresivitas pajak diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak yang efektif. Halioui et al. (2016) menyebutkan salah satu alasannya adalah perusahaan sering memanfaatkan operasional di luar negeri sebagai sarana perencanaan pajak dan ETR mampu merefleksikan bentuk agresivitas pajak tersebut. Penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) dalam menghitung agresivitas pajak dilakukan guna melihat seberapa efektif suatu entitas membayar pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan membedakan tingkat agresivitas pajak berdasarkan seberapa jauh nilai ETR menurun dari tarif pajak standar. Halioui et al. (2016) juga menambahkan bahwa perusahaan berupaya mengurangi beban pajak dengan menekan jumlah pendapatan kena pajak dengan tetap mempertahankan tingkat pendapatan dalam laporan keuangan akuntansi.

Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif pajak efektif yang mencerminkan presentase nyata dari laba kena pajak yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk pajak (Sofiati & Zulaikha, 2018). Atau dengan kata lain, *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan seberapa besar beban pajak yang sesungguhnya ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan penghasilannya. Lestari et al. (2019) mengatakan bahwa ETR yang tinggi mencerminkan rendahnya tingkat agresivitas perusahaan, sedangkan ETR yang rendah mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik perpajakan yang lebih agresif. Hal ini menandakan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan hubungan negatif dengan agresivitas pajak (Sofiati & Zulaikha, 2018). Tingkat agresivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan

ETR : *Effective Tax Rate*

3.1.2 Variabel Independen (X)

3.1.2.1 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan keadaan di mana perusahaan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan politisi atau pejabat pemerintah. Perusahaan juga dapat dikategorikan memiliki koneksi politik apabila kepemilikan saham terbesarnya berada di tangan pemerintah (Putri, 2018). Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan suatu perusahaan mempunyai koneksi politik mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu anggota direktur atau dewan komisaris menjabat pula sebagai anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat di salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.
2. Salah satu anggota direktur atau dewan komisaris merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.
3. Salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi berpengaruh, dan/atau pejabat atau mantan pejabat.

Penelitian ini mengoperasionalkan variabel koneksi politik dengan memberikan nilai 1 (satu) jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 (nol) jika tidak yang mengacu pada penelitian (Wahab et al., 2017). Variabel ini dihitung menggunakan *Dummy Variable* dengan memberikan keterangan sebagai berikut.

1 = Jika perusahaan memiliki koneksi politik

0 = Jika tidak memiliki koneksi politik

3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris independen merupakan pihak dari luar perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan dewan atau manajemen, tetapi tetap terlibat langsung dalam urusan organisasi perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi tersebut maka semakin tinggi pula tingkat independensi yang

dimiliki sehingga diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen dalam kaitannya dengan praktik agresivitas pajak. Perhitungan independensi dewan komisaris didasarkan pada penelitian dari Sofiati & Zulaikha (2018) yaitu sebagai berikut.

$$\text{Independensi Dewan Komisaris : } \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

3.1.2.3 Ukuran Dewan

Ukuran dewan diukur secara kuantitatif sebagai angka total anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Variabel ukuran dewan diukur berdasarkan jumlah anggota dewan yang tercantum dalam laporan tahunan. Dewan berkerja untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan, seperti terlaksananya strategi perusahaan, akuntabilitas perusahaan, dan pengelolaan manajemen. Sofiati & Zulaikha (2018) mengatakan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan akan mencegah manajer bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengukuran variabel ukuran dewan didasarkan pada penelitian Wahab et al. (2017), yaitu sebagai berikut:

Ukuran Dewan : Logaritma natural jumlah dewan

3.1.2.4 Dualitas CEO

Menurut Werner dalam Nurlalila (2013) dualitas CEO merujuk pada kondisi di mana satu individu memegang dua posisi sekaligus, yaitu sebagai CEO (*Chief Executive Officer*) dan sebagai *Chairman of The Board* dalam satu perusahaan.

Perhitungan variabel dualitas CEO mengacu pada Wahab et al. (2017), yaitu memberikan nilai 1 (satu) jika terdapat dualitas CEO di perusahaan tersebut dan memberikan nilai 0 (nol) jika tidak ada dualitas CEO di perusahaan tersebut.

Pengukuran ini menggunakan cara *Dummy Variable* dengan memberikan keterangan sebagai berikut.

1 = Jika terdapat dualitas CEO di suatu perusahaan

0 = Jika tidak terdapat dualitas CEO di suatu perusahaan

3.1.2.5 Investor Institusi

Investor institusi adalah ukuran proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau badan usaha yang mengelola dana secara profesional, seperti perusahaan investasi, dana pensiun, asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Institusi – institusi tersebut memiliki otoritas untuk mengawasi kinerja manajemen (Putri, 2018). Variabel investor institusi ini diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar seperti penelitian yang dilakukan Feranika et al. (2016) dan Putri (2018), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Investor Institusi} : \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

3.1.2.6 Auditor Eksternal

Variabel auditor eksternal diukur berdasarkan kualitas dan karakteristik audit yang dilakukan oleh auditor independen yang bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan tujuan memberikan pengawasan yang ketat sehingga

dapat menekan tingkat agresivitas pajak. Sulistyowati (2023) mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi terhadap laporan keuangan. Auditor merupakan pekerjaan profesional yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tugas melakukan pemeriksaan laporan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada penelitian Wahab et al. (2017), auditor BIG4 mengacu pada Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte Touche, Ernst & Young, KPMG Peat Marwick, dan Price Waterhouse.

Pengukuran variabel auditor eksternal mengacu pada Wahab et al. (2017), yaitu dengan memberikan nilai 1 (satu) ketika perusahaan diaudit oleh salah satu KAP berafiliasi oleh salah satu BIG4 dan nilai 0 (nol) ketika tidak. Variabel auditor eksternal diukur menggunakan *Dummy Variable* dengan memberikan keterangan sebagai berikut.

1 = Jika perusahaan diaudit oleh KAP berafiliasi oleh salah satu BIG4

0 = Jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP berafiliasi oleh salah satu BIG4

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang sengaja dibuat agar pengaruh variabel independen terhadap pengaruh variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Variabel kontrol sendiri dapat melindungi variabel independen dari variabel lain agar hasil penelitian menjadi lebih akurat. Dalam penelitian ini,

diidentifikasi beberapa variabel yang digunakan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan mencakup:

3.1.3.1 Total Aset

Total aset digunakan untuk mengukur perusahaan yang dioperasikan menggunakan metode logaritma natural. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak (Wahab et al., 2017).

$LASSETS$ = Logaritma natural dari total aset

3.1.3.2 Leverage

Leverage disertakan karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak perlu melakukan perencanaan pajak karena adanya manfaat penghematan pajak dari pembiayaan melalui utang (Chen et al., 2010).

$$DEBT = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.1.3.3 Market to Book Value

MTBV dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan faktor pertumbuhan (Wahab et al., 2017). Dalam hal ini, diperkirakan terdapat hubungan positif antara MTBV dan agresivitas pajak perusahaan.

$$MTBV = \frac{\text{Nilai Pasar}}{\text{Nilai Buku}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 – 2024 yang berjumlah 89 perusahaan sektor energi. Sektor energi adalah salah satu sektor penting yang dapat mempengaruhi industri lain dalam berkerja sehingga laporan keuangannya menjadi perhatian bagi banyak orang. Perusahaan di sektor energi dipilih karena tingginya minat investor untuk menanamkan modal di sektor ini sehingga ketepatan waktu dan keakuratan informasi keuangan perusahaan energi menjadi krusial seiring dengan meningkatnya kebutuhan investor terhadap informasi tersebut (Monica et al., 2022).

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan salah satu metode *non – probability sampling*, yaitu pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan dengan kriteria – kriteria tertentu (Rosidy & Nugroho, 2019). Dalam hal ini, anggota populasi yang tidak memenuhi kriteria atau syarat, tidak dapat dipilih sebagai sampel penelitian. Kriteria – kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2024.
2. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2021 – 2024 secara berturut – turut.
3. Perusahaan sektor energi yang memiliki nilai laba bersih positif selama periode 2021 – 2024 secara berturut – turut.

4. Perusahaan sektor energi yang dalam laporan keuangan nya menggunakan mata uang USD selama 2021 – 2024 secara berturut – turut.
5. Perusahaan sektor energi yang memiliki data lengkap untuk perhitungan variabel dalam laporan tahunan selama periode 2021 – 2024 secara berturut – turut.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diambil berupa laporan tahunan perusahaan energi yang terdaftar di laman resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui <https://www.idx.co.id/id> atau melalui situs resmi dari masing – masing perusahaan. Data sekunder yang digunakan berasal dari situs internet atau sumber referensi lain yang relevan dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Zefri, 2019).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data serta mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laman Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/>) atau melalui situs resmi dari masing – masing perusahaan dengan periode data yang digunakan dari tahun 2021 sampai 2024.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif yang mana dalam penelitian ini menggunakan data sekunder jenis *timeseries* dari tahun 2020 – 2024. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber lainnya berhasil dikumpulkan (Sugiyono, 2013).

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfokus pada kumpulan data dalam bentuk yang sederhana mengenai variabel yang digunakan. Analisis statistik deskriptif diartikan dengan analisis yang tanpa ada maksud membuat kesimpulan untuk generalisasi. Analisis statistik deskriptif berisi rata rata data, nilai median data, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain sebagainya. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabulasi silang, tabel distribusi frekuensi, grafik batang, grafik garis, dan *pie chart* (Sugiyono, 2013).

3.5.2 Analisis Regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari koneksi politik, independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, investor institusi, dan auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{ETR} = & \alpha + \beta_1 \text{POLCON} + \beta_2 \text{BIND} + \beta_3 \text{LBSIZE} + \beta_4 \text{DUALITY} + \beta_5 \text{INSTOWN} \\ & + \beta_6 \text{BIGN} + \beta_7 \text{LASSETS} + \beta_8 \text{DEBT} + \beta_9 \text{MTBV} + \varepsilon \end{aligned}$$

Keterangan:

ETR : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

POLCON : Koneksi Politik

BIND : Independensi Dewan Komisaris

LBSIZE : Ukuran Dewan

DUALITY : Dualitas CEO

INSTOWN : Investor Institusi

BIGN : Auditor Eksternal

LASSETS : Total Aset

DEBT : *Leverage*

MTBV : *Market to Book Value*

ε : *Error*

3.5.2.1 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji dan mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kualitas keabsahan dari data dan menghindari terjadinya estimasi bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian statistik untuk menetapkan apakah data berdistribusi atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2021). Ghozali (2021) menambahkan apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid terutama jika jumlah sampelnya kecil.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel – variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan kesulitan dalam mengestimasi koefisien regresi secara akurat.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series* ketika observasi berurutan saling berkaitan. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2021).

3.5.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independen dalam model regresi yang nilai nya berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memberikan sebagian informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Hal ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas model dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut.

3.5.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji statistik F bertujuan untuk melihat pengaruh simultan dari variabel – variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik F dilakukan dengan menghitung nilai F hitung dan membandingkannya dengan nilai F tabel. Uji ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menentukan kesesuaian model regresi yang digunakan.

3.5.2.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh masing – masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji statistik t merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Uji statistik t adalah alat penting yang digunakan untuk mengevaluasi kontribusi masing – masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, uji ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam penelitian kuantitatif ketika menggunakan kriteria yang jelas dan perhitungan yang tepat.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data – data tersebut diperoleh melalui publikasi laporan tahunan dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laman perusahaan masing – masing pada tahun 2021 hingga 2024. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel pada penelitian ini.

Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024.	89
2	Perusahaan sektor energi yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2021 – 2024 secara berturut – turut.	-31
3	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian selama tahun 2021 - 2024.	-16
4	Perusahaan dengan mata uang selain USD.	-14
5	Perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan data yang diperlukan secara lengkap selama periode 2021 – 2024 secara berturut – turut.	-5
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian		23
Total tahun observasi		4
Jumlah sampel		92

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 23 sampel perusahaan sektor energi yang dijadikan data dalam penelitian ini. Berikut tabel berisi nama – nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel.

Tabel 4. 2 Sampel Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	06 Des 2011
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	08 Nov 2012
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	30 Jul 1990
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	12 Agt 2008
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	10 Des 2009
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	07 Jun 2004
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	17 Nov 2011
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	06 Okt 2010
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	13 Sep 2006
10	INDY	Indika Energy Tbk.	11 Jun 2008
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	10 Des 1990
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	18 Des 2007
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	01 Jul 1991
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	12 Okt 1994
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	15 Des 2003
16	PTRO	Petrosea Tbk.	21 Mei 1990
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	03 Des 2014
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	06 Jul 2012
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	20 Feb 2013
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	29 Nov 2010
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	16 Jun 2016
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	05 Des 2017
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	07 Sep 2021

Sumber: Data yang diolah, 2025.

4.2 Analisis Data

Pada bagian analisis data akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan program aplikasi SPSS. Analisis data ini terdiri atas uji statistik deskriptif dan uji regresi untuk meneliti hipotesis penelitian.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis dasar dalam suatu penelitian yang berisi rangkuman. Statistik deskriptif memberikan rangkuman yang dapat dilihat dari nilai rata – rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi. Pada tabel 4.3 analisis statistik deskriptif dijelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif diperoleh dari 92 sampel penelitian. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	92	.00	.84	.2471	.16506
POLCON	92	.00	1.00	.7174	.45273
BIND	92	.20	.80	.4554	.14401
LBSIZE	92	1.10	2.71	1.5921	.41907
DUALITY	92	.00	1.00	.3478	.47889
INSTOWN	92	.01	.95	.6764	.20716
BIGN	92	.00	1.00	.4565	.50084
LASSETS	92	14.33	22.79	20.3282	1.74340
DEBT	92	.04	.85	.4233	.18770
MTBV	92	.14	1437.27	54.1117	249.00014
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai proksi variabel dependen menghasilkan nilai minimum, yakni 0,00 yang diperoleh dari Sumber Energi Andalan Tbk dan Petrosea Tbk pada tahun 2024. Nilai maksimum yang didapat dari ETR sebesar 0,84 yang diperoleh dari Wintermar Offshore Marine Tbk pada tahun 2021. Hal ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan profitabilitas, insentif pajak, atau pengelolaan pajak di masing – masing

perusahaan. Nilai rata – rata ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 0,2471 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,16506.

Variabel koneksi politik (POLCON) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata – rata koneksi politik (POLCON) sebesar 0,7174 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,45273. Berdasarkan nilai rata – rata variabel koneksi politik didapatkan presentase 71,74% yang menandakan perusahaan sektor energi yang terdaftar pada tahun 2024 berkoneksi secara politik. Selain itu, standar deviasi yang cukup besar menunjukkan distribusi yang cukup merata antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan yang tidak memiliki koneksi politik.

Variabel independensi dewan komisaris (BIND) memiliki nilai minimum sebesar 0,20 yang diperoleh dari Resource Alam Indonesia Tbk pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimum nya sebesar 0,80 yang diperoleh dari TBS Energi Utama Tbk dan Dian Swastatika Sentosa Tbk pada tahun 2023. Nilai rata – rata variabel independensi dewan komisaris (BIND) sebesar 0,4554 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,14401. Berdasarkan nilai minimum dan maksimum yang nilainya tidak terlalu jauh dari nilai rata – rata serta nilai standar deviasi yang sedang menandakan mayoritas perusahaan memiliki tingkat independensi dewan komisaris yang relatif serupa.

Variabel ukuran dewan (LBSIZE) memiliki nilai minimum sebesar 1,10 yang diperoleh dari beberapa perusahaan, yaitu ABM Investama Tbk, Energi Mega Persada Tbk, Harum Energy Tbk, Sumber Energi Andalan Tbk, Petrosea Tbk,

Soechi Lines Tbk, Wintermar Offshore Marine Tbk, Sillo Martime Perdana tbk, dan IMC Pelita Logistik Tbk. Kemudian, nilai maksimum dari variabel ukuran dewan (LBSIZE) adalah sebesar 2,71 yang diperoleh dari Bumi Resources Tbk pada tahun 2023. Nilai rata rata dari variabel ukuran dewan (LBSIZE) adalah sebesar 1,5921 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,41907. Perbedaan signifikan dalam ukuran dewan antar perusahaan menyebabkan variasi yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari nilai standar deviasinya.

Variabel dualitas CEO (DUALITY) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 1. Nilai rata – rata dualitas CEO (DUALITY) sebesar 0,3478 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,47889. Berdasarkan nilai rata – rata sebesar 0,3478 yang berarti 34,78% perusahaan memiliki dualitas CEO. Selain itu, standar deviasi yang tinggi menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara perusahaan yang menerapkan dan tidak menerapkan dualitas.

Variabel investor institusi (INSTOWN) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang diperoleh dari Bayan Resources Tbk pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,95 yang diperoleh dari Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2022. Nilai rata – rata dari variabel investor institusi (INSTOWN) adalah sebesar 0,6764 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,20716. Rata – rata 0,6764 menunjukkan bahwa hampir setengah dari saham suatu perusahaan dimiliki oleh institusi.

Variabel auditor eksternal (BIGN) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata – rata dari variabel auditor eksternal (BIGN) adalah 0,4565 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,50084. Standar deviasi yang hampir 0,5 menunjukkan distribusi yang hampir seimbang.

Variabel total aset (LASSETS) memiliki nilai minimum sebesar 14,33 yang diperoleh dari Indo Tambangraya Megah Tbk pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 22,79 yang didapatkan dari Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2024. Nilai rata – rata variabel total aset (LASSETS) adalah sebesar 20,3282 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 1,74340. Berdasarkan nilai rata – rata dan nilai standar deviasi yang kecil menandakan bahwa ukuran perusahaan di sampel relatif homogen tanpa perbedaan yang terlalu mencolok.

Variabel *leverage* (DEBT) memiliki nilai minimum sebesar 0,04 yang diperoleh dari Sumber Energi Andalan Tbk pada tahun 2022 dan nilai maksimumnya sebesar 0,85 yang diperoleh dari Bumi Resources pada tahun 2021. Nilai rata – rata dari variabel *leverage* (DEBT) adalah sebesar 0,4233 menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel cenderung memiliki tingkat liabilitas yang cukup tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi variabel *leverage* (DEBT) sebesar 0,18770 menandakan variasi *leverage* antar perusahaan cukup besar.

Variabel *market to book value* (MTBV) memiliki nilai minimum yakni sebesar 0,14 yang diperoleh dari Harum Energy Tbk pada tahun 2022 dan nilai maksimumnya sebesar 1437,27 yang didapatkan dari Indo Tambangraya Megah

Tbk pada tahun 2022. Nilai rata – rata dari variabel *market to book value* (MTBV) adalah sebesar 54,1117 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 249,00014.

Tabel 4.3 menunjukkan variabel dengan penyebaran besar (standar deviasi jauh lebih besar dibanding mean) perlu diwaspadai adanya outlier, seperti pada MTBV.

4.2.2 Analisis Regresi

Tabel 4. 4 Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{ETR} = & -0,944 + 0,095\text{POLCON} - 0,153\text{BIND} + 0,116\text{LBSIZE} + 0,089\text{DUALITY} \\
 & + 0,040\text{INSTOWN} - 0,011\text{BIGN} + 0,223\text{LASSETS} + 0,327\text{DEBT} + \\
 & 0,006\text{MTBV} + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Persamaan regresi linear di atas menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut penjelasan dari persamaan regresi linear di atas.

1. Nilai konstanta (α) menunjukkan nilai sebesar -0,944. Hal ini menunjukkan apabila nilai variabel independen dan variabel kontrol sama dengan 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan maka nilai tetap atau nilai awal mengindikasikan adanya penurunan tingkat agresivitas pajak sebesar -0,944.
2. Koefisien β_1 (POLCON) sebesar 0,095 mengindikasikan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Artinya jika perusahaan memiliki koneksi politik maka cenderung menaikkan tingkat ETR karena perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi sehingga tingkat agresivitas pajak menurun.
3. Koefisien β_2 (BIND) sebesar -0,153 mengindikasikan bahwa variabel ukuran independensi dewan komisaris berpengaruh menurunkan nilai ETR. Artinya semakin tinggi tingkat independensi dewan komisaris maka cenderung akan terjadi penurunan pada ETR sehingga tingkat agresivitas pajak meningkat.
4. Koefisien β_3 (LBSIZE) sebesar 0,116 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi tingkat ukuran dewan maka akan semakin tinggi kenaikan ETR suatu perusahaan sehingga agresivitas pajak menurun.
5. Koefisien β_4 (DUALITY) sebesar 0,089 menunjukkan bahwa variabel dualitas CEO berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Artinya jika dalam suatu perusahaan terdapat rangkap jabatan maka nilai ETR cenderung naik sehingga agresivitas pajak nya menurun.
6. Koefisien β_5 (INSTOWN) sebesar 0,040 mengindikasikan bahwa variabel investor institusi berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Hal ini

menunjukkan jika tingkat kepemilikan institusional tinggi maka akan cenderung meningkatkan nilai ETR sehingga agresivitas pajak nya menurun.

7. Koefisien β_6 (BIGN) sebesar - 0,011 menunjukkan bahwa variabel auditor eksternal berpengaruh dalam menurunkan nilai ETR. Artinya jika perusahaan menggunakan jasa dari auditor eksternal berafiliasi *Big Four* akan menurunkan nilai ETR suatu perusahaan sehingga tingkat agresivitas pajak meningkat.
8. Koefisien β_7 (LASSETS) sebesar 0,223 menunjukkan bahwa variabel kontrol total aset berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Artinya jika nilai total aset meningkat maka nilai ETR juga meningkat sehingga agresivitas pajak nya menurun.
9. Koefisien β_8 (DEBT) sebesar 0,327 mengindikasikan bahwa variabel kontrol *leverage* berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai *leverage* maka nilai ETR meningkat sehingga agresivitas pajak suatu perusahaan menurun.
10. Koefisien β_9 (MTBV) sebesar 0,006 mengindikasikan bahwa variabel kontrol *market to book value* berpengaruh dalam menaikkan nilai ETR. Artinya jika semakin besar nilai *market to book value* maka nilai ETR nya semakin tinggi sehingga agresivitas pajak nya menurun.

4.2.2.1 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1.1 Analisis Uji Asumsi Klasik Sebelum Transformasi dan Outlier

Uji asumsi klasik adalah syarat statistik yang perlu dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda (Budi et al., 2024). Dalam penelitian ini dilakukan analisis uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan pada nilai residual nya bukan pada masing – masing variabel. Berikut merupakan tabel uji normalitas.

Tabel 4. 5 Uji Normalitas Sebelum Transformasi dan Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13772950
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.081
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	<.001
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.000
	Upper Bound	.001

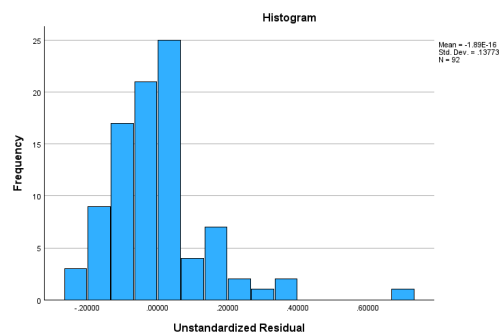
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan ouput hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ditemukan bahwa nilai signifikansi masih jauh di bawah batas 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa residual model regresi tidak terdistribusi normal yang nantinya dapat mempengaruhi validitas

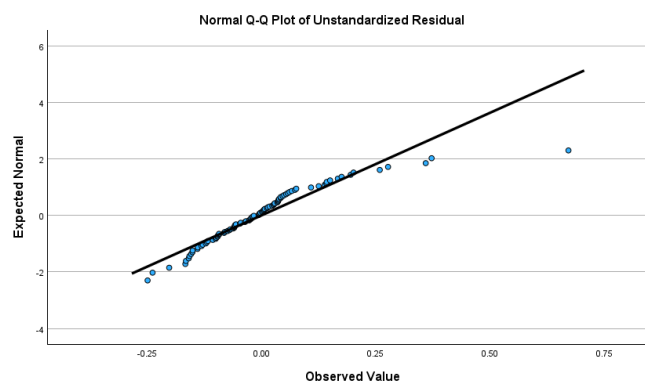
statistik pada model regresi klasik lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi data untuk mengatasi masalah ketidaknormalan ini.

Gambar 4. 1 Grafik Histogram Sebelum Transformasi dan Outlier



Berdasarkan grafik histogram 4.1 menunjukkan bahwa distribusi residual tidak simetris karena cenderung miring ke kanan (positif skewed). Sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai 0 (nol), tetapi distribusinya tidak membentuk *bell shaped* yang sempurna seperti distribusi normal pada umumnya. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penyimpangan dari distribusi normal.

Gambar 4. 2 Grafik Normal Probability Plot Sebelum Transformasi dan Outlier



Pada gambar 4.2 grafik *normal probability plot* sebelum transformasi ditemukan bahwa sebagian besar titik – titik memang berada di sekitar garis diagonal, tetapi terdapat titik – titik di bagian ekor (ujung kiri dan kanan) yang menyimpang cukup jauh dari garis. Penyimpangan pada ekor ini dapat mengindikasikan adanya ketidaknormalan pada distribusi residual.

2. Uji Multikolinearitas

Budi et al. (2024) menjelaskan bahwa alat statistik yang umum digunakan untuk menguji multikolinearitas antara lain adalah *variance inflation factor* (VIF), korelasi pearson, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI). Berikut merupakan tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas Sebelum Transformasi dan Outlier

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.409	.312		-1.311	.194		
	POLCON	.066	.044	.182	1.525	.131	.596	1.677
	BIND	.045	.122	.039	.368	.714	.755	1.325
	LBSIZE	-.043	.048	-.108	-.892	.375	.576	1.736
	DUALITY	.095	.037	.276	2.564	.012	.733	1.364
	INSTOWN	-.078	.081	-.098	-.968	.336	.821	1.218
	BIGN	-.061	.034	-.186	-1.809	.074	.802	1.247
	LASSETS	.030	.017	.321	1.789	.077	.264	3.790
	DEBT	.178	.103	.202	1.732	.087	.624	1.603
	MTBV	.000	.000	.303	1.775	.080	.291	3.438

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Dari hasil analisis uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa sebagian besar variabel memperoleh nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 menandakan tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan.

3. Uji Autokorelasi

Model regresi pada penelitian yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) biasanya memerlukan uji autokorelasi karena periodenya lebih dari satu tahun (Budi et al., 2024). Berikut merupakan hasil uji autokorelasi.

Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi dan Outlier

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.551 ^a	.304	.227	.14509	1.648

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIGN, BIND, LBSIZE, DUALITY, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Secara keseluruhan, hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki hubungan antara variabel independen dan dependen. Hal ini bisa dilihat dengan syarat autokorelasi, yaitu ketika nilai $du < dw < 4 - du$. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai dw sebesar 1,648, nilai du sebesar 1,8795, nilai $4 - du$ sebesar 2,1205. Dari syarat ini bisa dikatakan terjadi masalah autokorelasi karena nilai du (1,8795) lebih besar dari nilai dw (1,648).

4. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dianggap berhasil apabila terdapat kesamaan varians residual antar pengamatan yang disebut homoskedastisitas (Budi et al., 2024). Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas Sebelum Transformasi dan Outlier

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.345	.199		1.730
	POLCON	.026	.028	.119	.929
	BIND	.098	.078	.143	1.257
	LBSIZE	-.056	.031	-.240	1.842
	DUALITY	.051	.024	.247	2.140
	INSTOWN	-.112	.052	-.237	2.169
	BIGN	-.053	.022	-.272	2.462
	LASSETS	-.008	.011	-.135	.699
	DEBT	.038	.066	.073	.586
	MTBV	-2.702E-5	.000	-.069	.373

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa beberapa variabel nilai signifikansi nya dibawah 0,05. Beberapa variabel tersebut antara lain dualitas CEO (DUALITY), investor institusi (INSTOWN), dan auditor eksternal (BIGN) menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.2.1.2 Analisis Uji Asumsi Klasik Sesudah Transformasi dan Outlier

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis agar memastikan bahwa persamaan pada model regresi dapat diterima. Setelah melakukan uji asumsi klasik, ditemukan bahwa beberapa uji tidak

memenuhi kriteria asumsi sehingga diperlukan transformasi data. Akan tetapi, setelah dilakukan transformasi ditemukan bahwa kriteria asumsi belum terpenuhi sehingga diperlukan penanganan outlier. Penanganan terhadap pelanggaran asumsi dilakukan dengan melalui identifikasi solusi yang tepat guna mengurangi potensi dampak yang dapat terjadi (Budi et al., 2024). Setelah dilakukan penanganan terhadap asumsi ini dihasilkan total sampel 90 yang mana berkurang 2 dari total sampel sebelumnya, yaitu 92.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah distribusi nilai residual mengikuti pola distribusi normal atau tidak (Budi et al., 2024). Pengujian yang dilakukan adalah dengan uji non-parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S), uji grafik histogram, dan grafik *normal probability plot*. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov (K-S).

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.11809030
Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.056
	Negative		-.053
Test Statistic			.056
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.695
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.683
		Upper Bound	.707

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

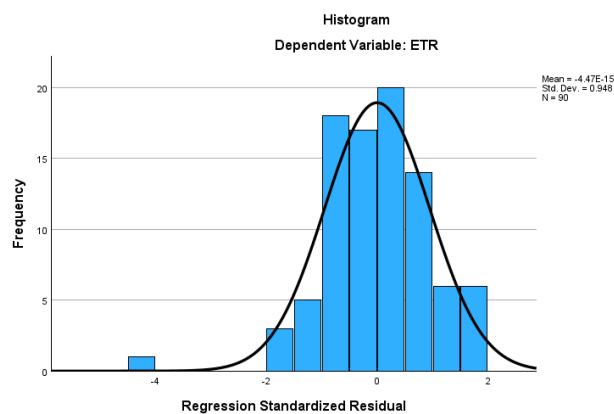
d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data yang diolah, 2025.

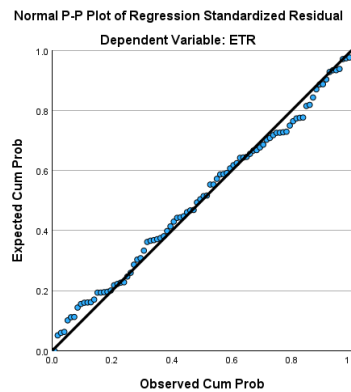
Dalam penelitian ini, dilakukan transformasi data untuk memastikan data terdistribusi secara normal. Data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan data tidak terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Tabel 4.9 menunjukkan nilai signifikansi 0,200 yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Gambar 4. 3 Grafik Histogram



Berdasarkan grafik histogram 4.3 ditemukan bahwa sebaran residual terdistribusi normal karena penyebaran data sudah sesuai dengan kurva normal. Bentuk histogram terlihat menyerupai lonceng (*Bell-shapep*) yang menandakan residual terdistribusi secara simetris di sekitar nilai nol.

Gambar 4. 4 Grafik *Normal Probability Plot*



Pada gambar 4.4 residual yang mengikuti garis diagonal menunjukkan asumsi normalitas residual pada model regresi telah dipenuhi karena terdistribusi secara normal. Hal ini bisa dilihat dari titik – titik pada grafik 4.4 yang sebagian besar mengikuti garis lurus hitam.

2. Uji Multikolinearitas

Budi et al. (2024) mengatakan uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa ada atau tidak korelasi yang tinggi antara variabel – variabel independen dalam model regresi linear berganda. Nilai yang biasanya digunakan adalah besarnya *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut merupakan uji multikolinearitas dari penelitian ini.

Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089		
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016	.581	1.721
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330	.797	1.254
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296	.552	1.812
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005	.793	1.261
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658	.829	1.206
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706	.774	1.293
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101	.238	4.205
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003	.615	1.627
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090	.261	3.832

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Dalam tabel 4.10 uji multikolinearitas tidak ditemukan multikolinearitas yang signifikan diantara variabel independen pada model regresi ini. Semua variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Budi et al. (2024) uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antara suatu periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik dilihat dari pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara data observasi dengan data observasi sebelumnya. Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.714 ^a	.510	.454	.12456	1.582

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.11 uji autokorelasi diketahui sampel pada penelitian ini sebanyak 92 sampel. Dalam penelitian ini bisa dilihat dari nilai Durbin – Watson sebesar 1,582 yang masih berada diantara nilai 0 sampai 4 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Dari tabel 4.11 pula diketahui bahwa nilai dw sebesar 1,582, nilai du sebesar 1,8813, dan nilai dl sebesar 1,4448. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $dl < dw < du$ bisa dikatakan nilai Durbin – Watson berada di ambang batas antara du dan dl.

4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians residual antar variabel dari nilai residual pada model regresi. Model regresi yang baik dapat dilihat dari tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji Glejser untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Berikut tabel uji heteroskedastisitas dari penelitian ini.

Tabel 4. 12 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.769	.327		2.350
	POLCON	.005	.023	.027	.199
	BIND	-.051	.093	-.064	.585
	LBSIZE	-.033	.066	-.071	.617
	DUALITY	.021	.018	.132	1.122
	INSTOWN	-.068	.054	-.144	-1.255
	BIGN	-.013	.018	-.086	-.724
	LASSETS	-.129	.080	-.344	-1.604
	DEBT	.061	.065	.126	.942
	MTBV	-.004	.002	-.403	-1.970

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan pada tabel 4.12 uji glejser sebagian besar variabel tidak mengalami heteroskedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi dari semua variabel independen bernilai lebih dari 0,05.

4.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan. Hasil uji koefisien determinasi ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.454	.12456

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.14 uji koefisien determinasi ini diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,510 yang berarti 51% variasi pada variabel dependen (*Effective Tax Rate*) dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen yang digunakan dalam model. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,454 menunjukkan 45,4% perubahan dalam *Effective Tax Rate* dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Nilai *Standard Error of The Estimate* sebesar 0,12456 menunjukkan besar rata – rata kesalahan dalam membuat prediksi. Dengan demikian, hasil uji koefisien determinasi mempunyai kemampuan moderat dalam menjelaskan variasi *Effective Tax Rate* berdasar variabel independen yang digunakan.

4.2.2.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikan simultan dilakukan guna mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, diduga bahwa variabel koneksi politik (POLCON), independensi dewan komisari (BIND), ukuran dewan (LBSIZE), dualitas CEO (DUALITY), investor institusi (INSTOWN), dan auditor eksternal (BIGN) secara bersama – sama dapat

mempengaruhi variabel agresivitas pajak (ETR). Berikut merupakan hasil uji signifikan simultan.

Tabel 4. 14 Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.290	9	.143	9.239	<.001 ^b
	Residual	1.241	80	.016		
	Total	2.531	89			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.15 uji signifikan simultan menghasilkan hasil output uji ANOVA yang memperoleh nilai F sebesar 9,239 dengan tingkat signifikansi <0,001. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$) sehingga model regresi yang digunakan sudah signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, model regresi yang digunakan dalam penelitian signifikan atau dengan kata lain menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak (ETR).

4.2.2.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji signifikan parameter individual ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak (ETR). Berikut merupakan hasil pengujian pengaruh antara koneksi politik, independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, kepemilikan institusi, dan auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Uji

signifikan parameter individual pengaruh variabel independen dapat didasarkan pada dua kriteria, yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$.

Tabel 4. 15 Uji Signifikan Parameter Individual

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.16 uji signifikan parameter individual diperoleh bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,990. Adapun hasil uji ini menunjukkan hanya 2 variabel independen dan 1 variabel kontrol yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap ETR, yaitu variabel koneksi politik (POLCON), dualitas CEO (DUALITY), dan *leverage* (DEBT). Ketiga variabel ini memiliki arah hubungan positif terhadap ETR sehingga menunjukkan peningkatan dalam variabel – variabel tersebut cenderung meningkatkan beban pajak efektif perusahaan, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ETR dalam model regresi ini.

Variabel koneksi politik (POLCON) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif dengan nilai signifikansi 0,016 ($< 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 2,465 yang nilainya lebih besar dari t_{tabel} ($> 1,990$). Oleh karena itu, H_1 diterima sehingga variabel koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

(ETR). Nilai ETR sendiri memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak sehingga koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik pada suatu perusahaan cenderung meningkatkan tingkat beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih patuh dalam pelaporan pajak atau berada dalam sorotan pengawasan yang lebih tinggi dari regulator sehingga tidak banyak melakukan praktik agresivitas pajak.

Selanjutnya, variabel dualitas CEO (DUALITY) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ETR dengan nilai signifikansi 0,005 ($< 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 2,885 yang mana nilainya lebih besar dari nilai t_{tabel} ($> 1,990$). Nilai ETR memiliki korelasi negatif terhadap agresivitas pajak sehingga dualitas CEO berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika CEO merangkap jabatan maka beban pajak efektif perusahaan cenderung lebih tinggi. Pemusatan kekuasaan ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk kebijakan perpajakan sehingga perusahaan cenderung tidak agresif dalam meminimalkan beban pajaknya. Oleh karena itu, H_4 diterima sehingga variabel dualitas CEO (DUALITY) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (ETR).

Variabel berikutnya yang signifikan adalah variabel kontrol, yaitu *leverage* (DEBT) dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,029 ($> 1,990$) dan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$), serta menunjukkan koefisien positif sebesar 0,327. Proksi agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan ETR yang berkorelasi negatif

terhadap agresivitas pajak sehingga *leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang dalam struktur keuangan perusahaan maka semakin tinggi ETR yang dilaporkan. Dalam konteks ini, perusahaan bisa jadi tidak memaksimalkan manfaat pajak dari utang atau cenderung menggunakan utang untuk pembiayaan yang tidak memberikan efisiensi pajak.

Adapun variabel independen lainnya, yaitu independensi dewan komisaris (BIND), ukuran dewan (LBSIZE), investor institusi (INSTOWN), dan auditor eksternal (BIGN) memiliki nilai t_{hitung} yang jauh di bawah t_{tabel} dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Oleh karena itu, keempat variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen, ukuran dewan, investor institusi, dan auditor eksternal afiliasi *Big Four* belum cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan pada sampel yang digunakan.

Hasil uji variabel independensi dewan komisaris (BIND) terhadap variabel agresivitas pajak (ETR) mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar -0,981 yang mana hasilnya lebih kecil dari t_{tabel} ($< 1,990$) maka tidak sesuai dengan kriteria sehingga H_2 ditolak. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,330 yang tidak sesuai dengan kriteria karena lebih besar dari tingkat signifikansi ($> 0,05$).

Hasil uji variabel ukuran dewan (LBSIZE) terhadap variabel agresivitas pajak (ETR) menunjukkan hasil ditolak. Hal ini bisa dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 1,053 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($< 1,990$) maka tidak sesuai dengan kriteria.

Nilai signifikansi ditemukan 0,296 yang hasilnya lebih besar dari nilai signifikansi ($> 0,05$). Oleh karena itu, H_3 ditolak sehingga ukuran dewan (LBSIZE) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).

Selanjutnya, hasil uji dari variabel investor institusi (INSTOWN) menunjukkan hasil ditolak. Nilai t_{hitung} ditemukan sebesar 0,445 yang menunjukkan lebih kecil dari t_{tabel} ($< 1,990$). Selain itu, nilai signifikansi ditemukan sebesar 0,658 yang tidak signifikan dengan kriteria ($> 0,05$) sehingga H_5 juga ditolak karena tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).

Hasil uji variabel auditor eksternal (BIGN) juga menunjukkan hasil ditolak dari hipotesis. Hasil nilai t_{hitung} ditemukan sebesar $-0,379$ yang hasilnya lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($< 1,990$) sehingga tidak sesuai dengan kriteria. Nilai signifikansi sebesar 0,706 juga ditemukan tidak signifikan sehingga H_6 ditolak.

Sementara itu, variabel kontrol total aset (LASSETS) dan *market to book value* (MTBV) memiliki nilai t_{hitung} 1,661 dan 1,719 yang masih berada di bawah nilai t_{tabel} ($< 1,990$). Nilai signifikansi juga ditemukan sebesar 0,101 dan 0,090 yang jauh dari nilai signifikan ($> 0,05$) maka H_a ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran aset dan *market to book value* perusahaan belum menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat beban pajak efektif.

4.3 Interpretasi Hasil

Penelitian ini memiliki enam hipotesis. Hipotesis pertama adalah koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kedua adalah independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hipotesis ketiga adalah ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis keempat adalah dualitas CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kelima adalah investor institusi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis keenam adalah auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berikut merupakan rangkuman hasil pengujian model hipotesis:

4.3.1 Koneksi Politik Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

Pada tabel 4.16 uji signifikan parameter individual yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,465 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($> 1,990$) dan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari batas signifikansi ($< 0,05$) sehingga koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap ETR. Koefisien regresi untuk variabel koneksi politik (POLCON) bernilai positif sebesar 0,095 yang mengindikasikan bahwa semakin kuat koneksi politik suatu perusahaan maka semakin tinggi ETR yang ditanggung perusahaan. ETR yang tinggi ini mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang rendah karena perusahaan tidak melakukan upaya secara agresif untuk menurunkan beban pajaknya.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintahan kemungkinan berada dalam pengawasan yang lebih tinggi dari regulator atau publik guna menjaga reputasi dan menghindari sorotan masyarakat. Selain itu, koneksi politik dapat menciptakan ekspektasi terhadap perusahaan untuk menjadi entitas yang teladan secara kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Wahab et al., 2017;

Wicaksono, 2017) yang hasilnya koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.3.2 Independensi Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Variabel independensi komisaris (BIND) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,153, nilai t_{hitung} sebesar -0,981, dan nilai signifikansi sebesar 0,330. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).

Temuan ini menemukan indikasi bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum cukup efektif dalam mengendalikan atau mengawasi manajemen dalam mengurangi praktik agresivitas pajak. Peran dewan komisaris independen cenderung bersifat formalitas dan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sofiati & Zulaikha (2018; Sulistyowati, 2023; Yuliani & Prastiwi, 2021) yang hipotesis awalnya juga ditolak dari hasil uji regresi yang dilakukan.

4.3.3 Ukuran Dewan Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Variabel ukuran dewan (LBSIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 0,116, nilai t_{hitung} sebesar 1,053, dan nilai signifikansi sebesar 0,296. Hasil uji ini juga menunjukkan bahwa ukuran dewan (LBSIZE) tidak signifikan.

Semakin besar ukuran dewan ternyata tidak dapat memberikan jaminan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan dalam hal kepatuhan pajaknya. Ukuran dewan yang terlalu besar justru akan menyebabkan koordinasi yang kurang efisien atau sebaliknya malah memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan sehingga tidak berdampak signifikan dalam mengurangi praktik agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sofiati & Zulaikha (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dari arah hubungan koefisien regresi yang berbeda dari hipotesis awal.

4.3.4 Dualitas CEO Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

Variabel dualitas CEO (DUALITY) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,089, nilai t_{hitung} sebesar 2,885, dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga pengaruh signifikan secara statistik. Koefisien positif pada variabel dualitas CEO (DUALITY) terhadap ETR berarti dualitas CEO cenderung menurunkan agresivitas pajak.

Hasil ini mendukung hipotesis bahwa dualitas CEO dapat mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan. Ketika CEO merangkap jabatan sebagai *chairman* maka nilai ETR perusahaan meningkat sehingga perusahaan menjadi kurang agresif dalam pengelolaan pajaknya. Temuan ini menjelaskan bahwa dualitas CEO dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab CEO dalam mengelola perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Halioui et al. (2016) yang hasilnya menunjukkan dualitas CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.3.5 Investor Institusi Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Variabel investor institusi (INSTOWN) menunjukkan adanya koefisien sebesar 0,040, nilai t_{hitung} sebesar 0,445, dan nilai signifikansi sebesar 0,658. Hasil uji ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Investor institusi secara teori memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan mendorong transparansi perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. Namun, temuan ini memberikan indikasi bahwa peran investor institusi di perusahaan sampel dalam penelitian ini belum optimal dalam menekan praktik agresivitas pajak. Investor institusi bisa jadi lebih fokus terhadap kinerja keuangan berjangka pendek daripada kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2018) yang hasilnya menunjukkan investor institusi tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak (ETR).

4.3.6 Auditor Eksternal Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Variabel auditor eksternal (BIGN) memiliki nilai koefisien regresi -0,011, nilai t_{hitung} sebesar -0,379, dan nilai signifikan 0,706. Hasil uji mengindikasikan bahwa auditor eksternal yang berafiliasi dengan *Big Four* tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi *Big Four* diharapkan memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih berkualitas, tetapi perilaku pajak tidak selalu berdampak. Hal ini bisa terjadi karena tekanan komersial atau konflik *stakeholder* yang menyebabkan auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi *Big Four* tidak sepenuhnya membatasi praktik agresif dalam perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2023) yang hasilnya kualitas auditor eksternal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan yang mencakup independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, investor institusi, dan auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan tingkat agresivitas pajak akan menurun ketika petinggi suatu perusahaan memiliki koneksi politik. Koneksi politik yang dimiliki petinggi perusahaan menunjukkan citra baik kepada masyarakat dan patuh dalam membayar pajak nya agar menjaga nama baik perusahaan nya.
2. Independensi dewan komisaris terbukti tidak dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga tidak sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi dewan komisaris belum mampu meningkatkan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Tinggi nya tingkat independensi dewan komisaris akan menghambat proses pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajemen untuk melakukan

agresivitas pajak karena koordinasi antar anggota bisa menjadi lebih kompleks dan sulit.

3. Ukuran dewan direksi juga tidak terbukti berpengaruh dalam hal menurunkan agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran direksi dapat menimbulkan kompleksitas dan beragam kepentingan pribadi anggotanya. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya kontrol dewan direksi terhadap manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak karena pengawasan yang kurang efektif.
4. Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap ETR sehingga dualitas CEO berpengaruh dalam menurunkan agresivitas pajak. Hal ini dapat dijelaskan dari koefisien positif pada variabel dualitas CEO terhadap ETR yang berarti perusahaan dengan CEO yang merangkap jabatan cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi sehingga agresivitas pajaknya lebih rendah. Dualitas CEO dinilai dapat menurunkan agresivitas pajak dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, mendorong kepatuhan, dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
5. Investor institusi tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam menurunkan agresivitas pajak yang artinya kepemilikan institusional yang tinggi belum mampu memberikan kendali eksternal yang cukup kuat terhadap perusahaan sehingga praktik agresivitas pajak tetap dapat direncanakan. Investor institusi memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan karena mereka bisa mendorong manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara melakukan praktik agresivitas pajak.

6. Auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa fungsi auditor eksternal lebih ke pemberian opini pada laporan keuangan dan tidak secara langsung mengatur kebijakan perpajakan suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi *Big Four* memang mendapatkan keuntungan karena citra baik dan kualitas audit yang lebih terjamin, tetapi auditor eksternal saja tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut.

1. Banyak perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan laporan tahunan secara publik dan beberapa mengalami kerugian sehingga tidak lolos kriteria sampel.
2. Hubungan kekerabatan antara pemangku kepentingan perusahaan dan aktor politik dalam pengukuran koneksi politik belum dimasukkan ke dalam kriteria pengukuan sehingga berpotensi menyebabkan tidak teridentifikasi secara menyeluruh mengenai koneksi politik secara informal melalui jalur kekeluargaan.
3. Variabel independen yang digunakan belum sepenuhnya mencakup semua faktor penting dari tata kelola perusahaan.

5.3 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi.

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel dengan melibatkan perusahaan dari sektor industri lain, dan memperpanjang periode observasi agar hasilnya lebih representatif dan umum.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan kriteria hubungan kekerabatan dalam pengukuran koneksi politik guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan mencerminkan hubungan informal yang sering terjadi di konteks sosial dan budaya Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel tata kelola perusahaan yang lebih beragam agar memudahkan analisis pengaruh pengawasan internal secara lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A. D. A. S., Septiana, L., & Mahendra, B. E. P. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(01), 1–11.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Duke, D. I., & Trisnawati, R. (2025). Analisis Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia. *Community Engagement & Emergence Journal*, 6(1), 190–206.
- Fadillah, A. R. (2017). ANALISIS PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Faiziyah, L. (2020). PENGARUH KONEKSI POLITIK, TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK.
- Feranika, A., Mukhzarudfa, & L, T. A. (2016). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi Keuangan & Keuangan Unja*, 1.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2008). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2).
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. In *Review of Accounting and Finance* (Vol. 15, Issue 4, pp. 445–462). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hamdani, M. (2016). GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF AGENCY THEORY. *SEMNAS FEKON*.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Khayati, P. A., Minarso, B., Mardjono, E. S., & Setiawanta, Y. (2024). INDIKASI AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 9.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Monica, S., Wira, A., Iswadi, T., & Adif, R. M. (2022). Faktor-Faktor Pengaruh dalam Audit Delay pada Perusahaan Energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020. *Jurnal Ekobistek*, 2. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.298>
- Nurlalila, S. (2013). *PENGARUH CEO DUALITY DAN INTERLOCKING DIRECTORSHIP TERHADAP KUALITAS AKRUAL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*.
- Oktavia, Kalangi, L., & Lambey, R. (2023). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN

SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 140–150.

- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 4(1), 20–28.
- Rosidy, D., & Nugroho, R. (2019). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Info Artha*, 1, 55–65.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21.
- Sofiati, S. A., & Zulaikha. (2018). ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Suhartonoputri, I. A., & Mahmudi. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *NCAF: PROCEEDING OF NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE*, 4, 346–355. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art43>
- Sulistyowati, C. N. A. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 2(1), 101–115.
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap

Agresivitas Pajak. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	06 Des 2011
2	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tb	16 Jul 2008
3	AIMS	Artha Mahiya Investama Tbk.	20 Jul 2001
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	03 Okt 1994
5	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk.	05 Jun 2013
6	ARII	Atlas Resources Tbk.	08 Nov 2011
7	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	30 Apr 2003
8	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana	09 Jan 2013
9	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastrukt	11 Feb 2010
10	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	08 Nov 2012
11	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.	23 Mei 2011
12	BUMI	Bumi Resources Tbk.	30 Jul 1990
13	BYAN	Bayan Resources Tbk.	12 Agt 2008
14	CANI	Capitol Nusantara Indonesia Tb	16 Jan 2014
15	CNKO	Exploitasi Energi Indonesia Tb	20 Nov 2001
16	DEWA	Darma Henwa Tbk	26 Sep 2007
17	DOID	BUMA Internasional Grup Tbk.	15 Jun 2001
18	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	10 Des 2009
19	ELSA	Elnusa Tbk.	06 Feb 2008
20	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	07 Jun 2004
21	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	17 Nov 2011
22	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	09 Jul 2009
23	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi	15 Des 1997
24	HRUM	Harum Energy Tbk.	06 Okt 2010
25	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	13 Sep 2006
26	INDY	Indika Energy Tbk.	11 Jun 2008
27	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	10 Des 1990
28	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	18 Des 2007
29	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	01 Jul 1991
30	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk.	04 Mei 2015
31	LEAD	Logindo Samudramakmur Tbk.	11 Des 2013
32	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	10 Jul 2014
33	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	06 Apr 2011

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
34	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	12 Okt 1994
35	MTFN	Capitalinc Investment Tbk.	16 Apr 1990
36	MYOH	Samindo Resources Tbk.	27 Jul 2000
37	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	15 Des 2003
38	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	11 Jul 2007
39	PTBA	Bukit Asam Tbk.	23 Des 2002
40	PTIS	Indo Straits Tbk.	12 Jul 2011
41	PTRO	Petrosea Tbk.	21 Mei 1990
42	RAJA	Rukun Raharja Tbk.	19 Apr 2006
43	RIGS	Rig Tenders Indonesia Tbk.	05 Mar 1990
44	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.	12 Jul 2006
45	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.	01 Des 1997
46	SMRU	SMR Utama Tbk.	10 Okt 2011
47	SOCI	Soechi Lines Tbk.	03 Des 2014
48	SUGI	Sugih Energy Tbk.	19 Jun 2002
49	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	06 Jul 2012
50	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	20 Feb 2013
51	TRAM	Trada Alam Minera Tbk.	10 Sep 2008
52	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	29 Nov 2010
53	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	16 Jun 2016
54	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	10 Mei 2017
55	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.	09 Jun 2017
56	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	05 Des 2017
57	DWGL	Dwi Guna Laksana Tbk.	13 Des 2017
58	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	15 Feb 2018
59	JSKY	Sky Energy Indonesia Tbk.	28 Mar 2018
60	INPS	Indah Prakasa Sentosa Tbk.	06 Apr 2018
61	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	06 Jul 2018
62	SURE	Super Energy Tbk.	05 Okt 2018
63	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.	08 Nov 2019
64	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.	18 Nov 2019
65	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tb	09 Mar 2020
66	SGER	Sumber Global Energy Tbk.	10 Agt 2020
67	UNIQ	Ulima Nitra Tbk.	08 Mar 2021
68	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	07 Sep 2021
69	GTSI	GTS Internasional Tbk.	08 Sep 2021
70	RMKE	RMK Energy Tbk.	07 Des 2021
71	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines	16 Des 2021
72	ADMR	Adaro Minerals Indonesia Tbk.	03 Jan 2022
73	SEMA	Semacom Integrated Tbk.	10 Jan 2022
74	SICO	Sigma Energy Compressindo Tbk.	08 Apr 2022
75	COAL	Black Diamond Resources Tbk.	07 Sep 2022
76	SUNI	Sunindo Pratama Tbk.	09 Jan 2023

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
77	CBRE	Cakra Buana Resources Energi T	09 Jan 2023
78	HILL	Hillcon Tbk.	01 Mar 2023
79	CUAN	Petrindo Jaya Kreasi Tbk.	08 Mar 2023
80	MAHA	Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk	25 Jul 2023
81	RMKO	Royaltama Mulia Kontraktorindo	31 Jul 2023
82	HUMI	Humpuss Maritim Internasional	09 Agt 2023
83	RGAS	Kian Santang Muliatama Tbk.	08 Nov 2023
84	CGAS	Citra Nusantara Gemilang Tbk.	08 Jan 2024
85	ALII	Ancara Logistics Indonesia Tbk	07 Feb 2024
86	MKAP	Multikarya Asia Pasifik Raya T	12 Feb 2024
87	ATLA	Atlantis Subsea Indonesia Tbk.	16 Apr 2024
88	BOAT	Newport Marine Services Tbk.	12 Nov 2024
89	AADI	Adaro Andalan Indonesia Tbk.	05 Des 2024

Lampiran 2 Tabulasi Data Agresivitas Pajak

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL DEPENDEN (Y)		
				BEBAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	60,486,977	246,670,880	0.24521
			2022	91,157,937	433,061,444	0.21050
			2023	55,867,030	371,490,923	0.15039
			2024	14,398,767	153,740,616	0.09366
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	59,044,129	264,208,458	0.22348
			2022	68,885,156	308,781,175	0.22309
			2023	58,320,495	220,589,954	0.26438
			2024	40,078,628	171,630,306	0.23352
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	67,684,665	291,061,679	0.23254
			2022	115,590,243	694,144,908	0.16652
			2023	49,924,476	82,350,214	0.60625
			2024	28,222,308	121,901,220	0.23152
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	361,616,399	1,627,573,741	0.22218
			2022	643,704,514	2,945,310,061	0.21855
			2023	353,387,654	1,632,968,496	0.21641
			2024	262,147,463	1,205,522,529	0.21746
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	114,037,498	379,375,031	0.30059
			2022	302,184,619	1,605,715,713	0.18819
			2023	315,756,167	1,181,069,686	0.26735
			2024	167,463,158	710,243,648	0.23578
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	90,408,378	130,092,217	0.69496
			2022	73,622,594	140,359,117	0.52453
			2023	33,122,884	101,298,341	0.32698
			2024	21,940,161	94,903,219	0.23118
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	106,816,383	460,840,753	0.23179
			2022	202,784,670	898,692,704	0.22564
			2023	154,232,563	682,980,975	0.22582
			2024	152,628,587	635,760,266	0.24007
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	29,089,637	127,569,867	0.22803
			2022	97,775,087	477,547,194	0.20474
			2023	67,328,341	263,000,453	0.25600
			2024	37,445,542	115,105,273	0.32532
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	4,722,013	10,251,435	0.46062
			2022	14,888,931	53,850,317	0.27649
			2023	5,531,064	31,924,056	0.17326
			2024	4,459,503	12,135,807	0.36747
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	294,689,659	502,107,483	0.58691
			2022	499,561,131	1,010,337,228	0.49445
			2023	87,387,543	238,430,634	0.36651
			2024	53,074,918	84,888,126	0.62523
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	4,219	12,256,008	0.00034
			2022	8,885	30,549,794	0.00029
			2023	4,702	2,087,099	0.00225
			2024	586	1,870,216	0.00031
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	145,699	621,089	0.23459
			2022	345,447	1,544,792	0.22362
			2023	144,492	644,112	0.22433
			2024	119,220	494,821	0.24094
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	10,954,593	33,958,118	0.32259
			2022	19,002,911	58,058,817	0.32730
			2023	12,320,751	39,123,312	0.31492
			2024	20,150,343	60,296,581	0.33419

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL DEPENDEN (Y)		
				BEBAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	222,831,712	269,379,241	0.82720
			2022	507,971,978	1,045,601,581	0.48582
			2023	339,666,380	727,853,432	0.46667
			2024	289,339,733	671,050,389	0.43117
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	103,404,760	467,938,895	0.22098
			2022	141,361,720	542,704,261	0.26048
			2023	147,271,108	523,887,009	0.28111
			2024	138,652,608	578,289,878	0.23976
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	7,381,000	41,334,000	0.17857
			2022	8,989,000	50,155,000	0.17922
			2023	3,609,000	16,047,000	0.22490
			2024	(2,084)	7,868,000	-0.00026
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	2,294,916	7,727,293	0.29699
			2022	2,303,190	8,782,635	0.26224
			2023	1,969,914	10,901,104	0.18071
			2024	1,994,473	19,136,874	0.10422
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	20,864,826	86,472,233	0.24129
			2022	20,800,288	114,685,642	0.18137
			2023	12,005,343	32,851,613	0.36544
			2024	12,901,719	60,877,846	0.21193
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	508,245	4,467,565	0.11376
			2022	756,403	15,052,566	0.05025
			2023	1,334,735	35,064,309	0.03807
			2024	1,428,912	34,157,847	0.04183
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	676,907	807,004	0.83879
			2022	85,432	946,527	0.09026
			2023	53,051	6,683,678	0.00794
			2024	3,394,999	35,695,183	0.09511
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	3,390,223	24,384,996	0.13903
			2022	3,327,096	29,446,376	0.11299
			2023	3,535,318	29,298,782	0.12066
			2024	3,433,159	27,557,163	0.12458
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	2,683,397	27,725,203	0.09679
			2022	4,495,932	46,828,255	0.09601
			2023	5,102,102	45,992,754	0.11093
			2024	2,306,722	16,629,599	0.13871
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	76,954,652	351,854,412	0.21871
			2022	99,607,079	457,912,364	0.21752
			2023	60,087,032	294,998,816	0.20369
			2024	29,599,477	146,515,045	0.20202

Lampiran 3 Tabulasi Data Koneksi Politik

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X1)
				POLCON
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	0
			2022	1
			2023	1
			2024	1
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X1)
				POLCON
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	0
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0

Lampiran 4 Tabulasi Data Independensi Dewan Komisaris

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL DEPENDEN (X2)		
				Dewan Komisaris Independen	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	BIND
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	2	4	0.5
			2022	2	4	0.5
			2023	2	4	0.5
			2024	2	4	0.5
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	4	11	0.4
			2022	3	11	0.3
			2023	3	8	0.4
			2024	3	8	0.4
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	4	8	0.5
			2022	4	8	0.5
			2023	5	8	0.6
			2024	5	8	0.6
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	2	4	0.5
			2022	2	4	0.5
			2023	3	6	0.5
			2024	3	6	0.5
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	3	5	0.6
			2022	4	6	0.7
			2023	4	5	0.8
			2024	4	7	0.6
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	2	5	0.4
			2022	2	5	0.4
			2023	2	6	0.3
			2024	2	6	0.3
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	3	6	0.5
			2022	2	6	0.3
			2023	2	6	0.3
			2024	2	6	0.3
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	2	5	0.4
			2022	2	5	0.4
			2023	2	5	0.4
			2024	2	5	0.4
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	1	2	0.5
			2022	1	3	0.3
			2023	1	3	0.3
			2024	1	3	0.3
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	2	5	0.4
			2022	2	5	0.4
			2023	2	5	0.4
			2024	2	5	0.4
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	1	3	0.3
			2022	1	3	0.3
			2023	1	2	0.5
			2024	1	2	0.5
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	3	7	0.4
			2022	3	8	0.4
			2023	3	8	0.4
			2024	3	10	0.3
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	1	5	0.2
			2022	2	5	0.4
			2023	2	5	0.4
			2024	2	5	0.4

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL DEPENDEN (X2)		
				Dewan Komisaris Independen	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	BIND
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	2	4	0.5
			2022	1	3	0.3
			2023	1	3	0.3
			2024	1	3	0.3
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	3	6	0.5
			2022	3	6	0.5
			2023	4	6	0.7
			2024	5	7	0.7
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	2	5	0.4
			2022	4	8	0.5
			2023	2	6	0.3
			2024	2	6	0.3
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	1	2	0.5
			2022	1	2	0.5
			2023	1	2	0.5
			2024	1	2	0.5
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	3	4	0.8
			2022	3	4	0.8
			2023	3	4	0.8
			2024	3	4	0.8
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	1	3	0.3
			2022	1	2	0.5
			2023	1	2	0.5
			2024	1	2	0.5
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	2	3	0.7
			2022	2	3	0.7
			2023	2	3	0.7
			2024	2	3	0.7
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	1	2	0.5
			2022	1	2	0.5
			2023	1	2	0.5
			2024	1	3	0.3
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	2	5	0.4
			2022	1	3	0.3
			2023	1	3	0.3
			2024	2	4	0.5
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	1	3	0.3
			2022	1	3	0.3
			2023	1	3	0.3
			2024	1	3	0.3

Lampiran 5 Tabulasi Data Ukuran Direksi

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X3)	
				Jumlah Anggota Dewan Direksi	LBSIZE
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	3	1.098612289
			2024	4	1.386294361
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	8	2.079441542
			2022	10	2.302585093
			2023	8	2.079441542
			2024	8	2.079441542
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	11	2.397895273
			2022	10	2.302585093
			2023	15	2.708050201
			2024	13	2.564949357
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	7	1.945910149
			2022	10	2.302585093
			2023	12	2.48490665
			2024	11	2.397895273
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	6	1.791759469
			2022	6	1.791759469
			2023	6	1.791759469
			2024	7	1.945910149
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	6	1.791759469
			2024	6	1.791759469
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	6	1.791759469
			2022	6	1.791759469
			2023	6	1.791759469
			2024	6	1.791759469
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	4	1.386294361
			2022	4	1.386294361
			2023	3	1.098612289
			2024	3	1.098612289
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	5	1.609437912
			2022	4	1.386294361
			2023	6	1.791759469
			2024	6	1.791759469
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	5	1.609437912
			2022	5	1.609437912
			2023	5	1.609437912
			2024	5	1.609437912
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	3	1.098612289
			2024	3	1.098612289

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X3)	
				Jumlah Anggota Dewan Direksi	LBSIZE
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	9	2.197224577
			2022	9	2.197224577
			2023	9	2.197224577
			2024	10	2.302585093
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	5	1.609437912
			2022	5	1.609437912
			2023	6	1.791759469
			2024	6	1.791759469
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	5	1.609437912
			2022	5	1.609437912
			2023	5	1.609437912
			2024	5	1.609437912
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	6	1.791759469
			2022	6	1.791759469
			2023	6	1.791759469
			2024	7	1.945910149
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	5	1.609437912
			2023	5	1.609437912
			2024	5	1.609437912
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	3	1.098612289
			2024	3	1.098612289
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	4	1.386294361
			2022	5	1.609437912
			2023	6	1.791759469
			2024	6	1.791759469
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	4	1.386294361
			2022	4	1.386294361
			2023	4	1.386294361
			2024	4	1.386294361
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	4	1.386294361
			2023	4	1.386294361
			2024	4	1.386294361
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	3	1.098612289
			2024	3	1.098612289
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	3	1.098612289
			2022	3	1.098612289
			2023	3	1.098612289
			2024	3	1.098612289
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	4	1.386294361
			2022	4	1.386294361
			2023	4	1.386294361
			2024	4	1.386294361

Lampiran 6 Tabulasi Data Dualitas CEO

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X4)
				DUALITY
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	1
			2024	1
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	1
			2022	0
			2023	0
			2024	0
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	1
			2022	0
			2023	1
			2024	1
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X4)
				DUALITY
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	0
			2024	0
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1

Lampiran 7 Tabulasi Data Investor Institusi

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X5)		
				Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham Beredar	INSTOWN
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	2,176,923,000	2,753,165,000	0.7907
			2022	2,176,923,000	2,753,165,000	0.7907
			2023	2,176,923,000	2,753,165,000	0.7907
			2024	2,176,923,000	2,753,165,000	0.7907
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	2,374,242,774	2,616,500,000	0.9074
			2022	2,374,242,774	2,616,500,000	0.9074
			2023	2,374,242,774	2,616,500,000	0.9074
			2024	2,374,242,774	2,616,500,000	0.9074
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	14,845,151,178	74,274,746,007	0.1999
			2022	239,653,396,330	371,320,676,795	0.6454
			2023	239,653,936,330	371,320,705,024	0.6454
			2024	239,203,083,230	371,320,705,024	0.6442
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	333,338,000	33,333,335,000	0.0100
			2022	3,333,380,000	33,333,335,000	0.1000
			2023	3,333,380,000	33,333,335,000	0.1000
			2024	3,333,380,000	33,333,335,000	0.1000
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	461,552,320	770,552,320	0.5990
			2022	461,552,320	770,552,320	0.5990
			2023	461,552,320	770,552,320	0.5990
			2024	4,615,523,200	7,705,523,200	0.5990
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	12,743,481,890	24,821,230,250	0.5134
			2022	13,300,674,144	24,821,230,250	0.5359
			2023	14,257,557,261	24,821,230,250	0.5744
			2024	12,701,889,881	24,821,230,250	0.5117
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	5,441,176,615	5,882,353,000	0.9250
			2022	5,559,841,015	5,882,353,000	0.9452
			2023	5,269,628,153	5,882,353,000	0.8958
			2024	5,271,403,353	5,882,353,000	0.8961
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	2,159,774,800	2,607,267,200	0.8284
			2022	10,798,874,000	13,316,246,500	0.8110
			2023	10,798,874,000	13,316,246,500	0.8110
			2024	10,798,874,000	13,250,205,700	0.8150
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	1,713,974,815	11,415,812,114	0.1501
			2022	11,127,666,666	25,238,221,508	0.4409
			2023	13,450,390,309	25,238,245,486	0.5329
			2024	16,181,978,383	25,238,245,486	0.6412
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	3,565,859,790	5,210,192,000	0.6844
			2022	3,432,038,290	5,210,192,000	0.6587
			2023	3,432,038,290	5,210,192,000	0.6587
			2024	3,432,038,290	5,210,192,000	0.6587
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	717,158,000	870,701,000	0.8237
			2022	717,158,000	999,053,167	0.7178
			2023	780,956,000	999,053,167	0.7817
			2024	664,207,267	999,053,167	0.6648
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	736,071,000	1,129,925,000	0.6514
			2022	736,071,000	1,129,925,000	0.6514
			2023	736,071,000	1,129,925,000	0.6514
			2024	736,071,000	1,129,925,000	0.6514
13	KKG	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	3,549,224,785	5,000,000,000	0.7098
			2022	3,531,638,885	5,000,000,000	0.7063
			2023	3,689,926,385	5,000,000,000	0.7380
			2024	4,052,717,276	5,000,000,000	0.8105

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X5)		
				Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham Beredar	INSTOWN
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	18,339,345,895	25,136,231,252	0.7296
			2022	18,339,345,895	25,136,231,252	0.7296
			2023	18,339,345,895	25,136,231,252	0.7296
			2024	18,339,345,895	25,136,231,252	0.7296
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	13,809,038,755	24,241,508,196	0.5696
			2022	13,809,038,755	24,241,508,196	0.5696
			2023	13,809,038,755	24,241,508,196	0.5696
			2024	13,809,038,755	24,241,508,196	0.5696
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	704,014,200	1,008,605,000	0.6980
			2022	905,705,657	1,008,605,000	0.8980
			2023	885,113,857	1,008,605,000	0.8776
			2024	723,412,757	1,008,605,000	0.7172
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	5,640,000,000	7,059,000,000	0.7990
			2022	5,640,000,000	7,059,000,000	0.7990
			2023	4,708,522,504	7,059,000,000	0.6670
			2024	4,708,522,504	7,059,000,000	0.6670
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	7,059,903,400	8,049,964,000	0.8770
			2022	6,880,140,900	8,068,271,058	0.8527
			2023	6,155,190,900	8,106,700,622	0.7593
			2024	6,133,330,900	8,167,826,937	0.7509
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	1,950,517,190	2,647,044,990	0.7369
			2022	1,699,273,080	2,633,300,000	0.6453
			2023	1,994,169,690	2,633,300,000	0.7573
			2024	2,331,015,187	3,507,420,034	0.6646
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	1,484,926,248	4,346,087,057	0.3417
			2022	1,484,926,248	4,358,812,057	0.3407
			2023	1,484,926,248	4,364,337,057	0.3402
			2024	1,484,926,248	4,366,087,057	0.3401
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
			2022	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
			2023	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
			2024	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	2,374,000,000	5,417,063,153	0.4382
			2022	4,612,672,599	5,417,063,153	0.8515
			2023	4,612,613,599	5,417,063,153	0.8515
			2024	4,611,742,999	5,417,063,153	0.8513
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
			2022	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
			2023	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
			2024	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910

Lampiran 8 Tabulasi Data Auditor Eksternal

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X6)
				DUALITY
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	0
			2024	0
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN (X6)
				DUALITY
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1

Lampiran 9 Tabulasi Data Total Aset

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K1)	
				Total Aset	LASSETS (K1)
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	1,036,704,159	20.759
			2022	1,982,578,564	21.408
			2023	2,156,687,895	21.492
			2024	2,095,451,602	21.463
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	435,317,386	19.892
			2022	404,831,175	19.819
			2023	408,454,573	19.828
			2024	383,118,825	19.764
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	4,223,787,286	22.164
			2022	4,488,046,969	22.225
			2023	4,202,694,216	22.159
			2024	4,163,401,077	22.150
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	2,433,712,191	21.613
			2022	3,945,458,865	22.096
			2023	3,444,319,816	21.960
			2024	3,521,455,934	21.982
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	3,010,072,696	21.825
			2022	6,431,179,918	22.584
			2023	3,063,273,017	21.843
			2024	3,695,071,259	22.030
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	1,064,042,571	20.785
			2022	1,194,330,408	20.901
			2023	1,368,757,121	21.037
			2024	1,583,258,785	21.183
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	829,026,937	20.536
			2022	1,129,086,804	20.845
			2023	1,312,042,245	20.995
			2024	1,239,571,887	20.938
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	874,657,582	20.589
			2022	1,278,805,856	20.969
			2023	1,633,107,192	21.214
			2024	2,574,539,092	21.669
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	99,945,119	18.420
			2022	180,289,993	19.010
			2023	245,446,279	19.319
			2024	227,965,515	19.245
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	3,691,477,101	22.029
			2022	3,593,872,042	22.002
			2023	3,113,102,390	21.859
			2024	2,962,763,809	21.809
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	182,973,654	19.025
			2022	219,179,977	19.205
			2023	226,695,921	19.239
			2024	250,982,896	19.341

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K1)	
				Total Aset	LASSETS (K1)
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	1,666,239	14.326
			2022	2,640,177	14.786
			2023	2,187,847	14.598
			2024	2,406,544	14.694
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	132,182,307	18.700
			2022	170,184,690	18.952
			2023	200,536,560	19.117
			2024	208,967,020	19.158
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	5,863,884,139	22.492
			2022	6,931,905,826	22.659
			2023	7,463,316,269	22.733
			2024	7,926,890,365	22.794
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	7,510,948,902	22.740
			2022	7,194,859,982	22.697
			2023	6,599,238,469	22.610
			2024	6,415,949,730	22.582
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	532,736,000	20.094
			2022	596,420,000	20.206
			2023	727,945,000	20.406
			2024	867,265,000	20.581
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	629,210,009	20.260
			2022	633,959,947	20.267
			2023	604,303,565	20.220
			2024	602,681,935	20.217
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	858,101,884	20.570
			2022	899,329,557	20.617
			2023	947,837,728	20.670
			2024	893,736,128	20.611
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	99,256,380	18.413
			2022	107,381,644	18.492
			2023	192,957,339	19.078
			2024	247,912,342	19.329
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	196,081,516	19.094
			2022	189,445,736	19.060
			2023	194,795,420	19.087
			2024	232,544,068	19.265
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	325,466,330	19.601
			2022	379,305,467	19.754
			2023	432,180,554	19.884
			2024	483,419,102	19.996
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	161,236,150	18.898
			2022	179,354,447	19.005
			2023	203,871,968	19.133
			2024	189,560,738	19.060
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	576,551,349	20.173
			2022	734,626,993	20.415
			2023	744,875,988	20.429
			2024	759,216,464	20.448

Lampiran 10 Tabulasi Data Leverage

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K2)		
				Total Liabilitas	Total Aset	DEBT (K2)
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	679,815,042	1,036,704,159	0.656
			2022	1,365,057,289	1,982,578,564	0.689
			2023	1,397,760,928	2,156,687,895	0.648
			2024	1,248,196,706	2,095,451,602	0.596
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	182,704,693	435,317,386	0.420
			2022	184,353,401	404,831,175	0.455
			2023	165,971,113	408,454,573	0.406
			2024	119,049,246	383,118,825	0.311
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	3,577,340,599	4,223,787,286	0.847
			2022	1,669,538,707	4,488,046,969	0.372
			2023	1,427,918,135	4,202,694,216	0.340
			2024	1,299,156,719	4,163,401,077	0.312
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	570,805,817	2,433,712,191	0.235
			2022	1,950,168,318	3,945,458,865	0.494
			2023	1,465,501,614	3,444,319,816	0.425
			2024	1,207,613,523	3,521,455,934	0.343
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	1,259,863,437	3,010,072,696	0.419
			2022	3,439,195,930	6,431,179,918	0.535
			2023	1,342,457,831	3,063,273,017	0.438
			2024	1,751,491,866	3,695,071,259	0.474
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	615,078,799	1,064,042,571	0.578
			2022	679,404,122	1,194,330,408	0.569
			2023	783,652,104	1,368,757,121	0.573
			2024	926,118,167	1,583,258,785	0.585
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	517,702,894	829,026,937	0.624
			2022	570,842,165	1,129,086,804	0.506
			2023	648,930,158	1,312,042,245	0.495
			2024	578,443,998	1,239,571,887	0.467
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	223,185,399	874,657,582	0.255
			2022	286,533,351	1,278,805,856	0.224
			2023	458,386,742	1,633,107,192	0.281
			2024	791,884,570	2,574,539,092	0.308
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	73,359,565	99,945,119	0.734
			2022	104,932,829	180,289,993	0.582
			2023	142,305,447	245,446,279	0.580
			2024	119,600,202	227,965,515	0.525
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	2,807,763,436	3,691,477,101	0.761
			2022	2,253,698,079	3,593,872,042	0.627
			2023	1,735,964,940	3,113,102,390	0.558
			2024	1,607,576,874	2,962,763,809	0.543
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	10,725,200	182,973,654	0.059
			2022	9,655,696	219,179,977	0.044
			2023	15,091,389	226,695,921	0.067
			2024	36,800,076	250,982,896	0.147
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	464,680	1,666,239	0.279
			2022	689,897	2,640,177	0.261
			2023	399,307	2,187,847	0.183
			2024	472,734	2,406,544	0.196

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K2)		
				Total Liabilitas	Total Aset	DEBT (K2)
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	33,261,651	132,182,307	0.252
			2022	47,245,548	170,184,690	0.278
			2023	61,195,903	200,536,560	0.305
			2024	48,111,781	208,967,020	0.230
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	4,454,547,678	5,863,884,139	0.760
			2022	5,184,386,501	6,931,905,826	0.748
			2023	5,440,720,277	7,463,316,269	0.729
			2024	5,575,858,796	7,926,890,365	0.703
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	4,226,024,344	7,510,948,902	0.563
			2022	3,753,089,344	7,194,859,982	0.522
			2023	3,058,835,090	6,599,238,469	0.464
			2024	2,744,422,446	6,415,949,730	0.428
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	272,513,000	532,736,000	0.512
			2022	298,429,000	596,420,000	0.500
			2023	492,315,000	727,945,000	0.676
			2024	617,515,000	867,265,000	0.712
17	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	261,762,446	629,210,009	0.416
			2022	259,890,374	633,959,947	0.410
			2023	221,780,720	604,303,565	0.367
			2024	202,290,540	602,681,935	0.336
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	503,876,557	858,101,884	0.587
			2022	475,619,264	899,329,557	0.529
			2023	524,150,083	947,837,728	0.553
			2024	457,075,898	893,736,128	0.511
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	22,190,861	99,256,380	0.224
			2022	18,550,940	107,381,644	0.173
			2023	63,224,562	192,957,339	0.328
			2024	98,917,276	247,912,342	0.399
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	42,115,895	196,081,516	0.215
			2022	33,837,309	189,445,736	0.179
			2023	32,875,918	194,795,420	0.169
			2024	40,325,608	232,544,068	0.173
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	174,609,148	325,466,330	0.536
			2022	207,105,862	379,305,467	0.546
			2023	236,710,174	432,180,554	0.548
			2024	261,784,774	483,419,102	0.542
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	46,580,263	161,236,150	0.289
			2022	33,479,337	179,354,447	0.187
			2023	35,252,841	203,871,968	0.173
			2024	31,318,174	189,560,738	0.165
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	173,934,322	576,551,349	0.302
			2022	167,935,530	734,626,993	0.229
			2023	159,213,585	744,875,988	0.214
			2024	177,516,904	759,216,464	0.234

Lampiran 11 Tabulasi Market to Book Value

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K2)			
				Harga Pasar Persaham	Total Ekuitas	Jumlah Saham Beredar	MTBV (K3)
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	0.09952	356,889,117	2,753,165,000	0.76770
			2022	0.20851	617,521,275	2,753,165,000	0.92960
			2023	0.22055	758,926,967	2,753,165,000	0.80009
			2024	0.21903	847,254,896	2,753,165,000	0.71175
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	0.28664	252,612,693	2,616,500,000	2.96890
			2022	0.27589	220,477,774	2,616,500,000	3.27408
			2023	0.25039	242,483,460	2,616,500,000	2.70181
			2024	0.28647	264,069,579	2,616,500,000	2.83850
3	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	0.00470	646,446,687	74,274,746,007	0.53950
			2022	0.01023	2,818,508,262	371,320,676,795	1.34834
			2023	0.00551	2,774,776,081	371,320,705,024	0.73785
			2024	0.00835	2,864,244,358	371,320,705,024	1.08287
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	1.89221	2,433,712,191	33,333,335,000	25.91670
			2022	1.33494	3,945,458,865	33,333,335,000	11.27831
			2023	1.29087	3,444,319,816	33,333,335,000	12.493
			2024	1.25294	3,521,455,934	33,333,335,000	11.860
5	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	3.43402	1,750,209,259	770,552,320	1.512
			2022	2.53004	2,991,983,988	770,552,320	0.652
			2023	7.84899	1,720,815,186	770,552,320	3.515
			2024	2.28932	1,943,579,393	7,705,523,200	9.076
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	0.00820	448,963,772	24,821,230,250	0.453
			2022	0.01869	514,926,286	24,821,230,250	0.901
			2023	0.01427	585,105,017	24,821,230,250	0.605
			2024	0.01423	656,140,618	24,821,230,250	0.538
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	0.55715	316,324,043	5,882,353,000	10.361
			2022	0.44816	558,244,639	5,882,353,000	4.722
			2023	0.37623	663,112,087	5,882,353,000	3.337
			2024	0.65741	661,127,889	5,882,353,000	5.849
8	HRUM	Harum Energy Tbk.	2021	0.72360	651,472,183	2,607,267,200	2.896
			2022	0.01027	992,272,505	13,316,246,500	0.138
			2023	0.08660	1,174,720,450	13,316,246,500	0.982
			2024	0.06404	1,782,654,522	13,250,205,700	0.476
9	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	0.00350	99,945,119	11,415,812,114	0.400
			2022	0.00763	180,289,993	25,238,221,508	1.068
			2023	0.00324	103,140,832	25,238,245,486	0.794
			2024	0.00309	108,365,313	25,238,245,486	0.721
10	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	0.10828	883,713,665	5,210,192,000	0.638
			2022	0.17354	1,340,173,963	5,210,192,000	0.675
			2023	0.09309	1,377,137,450	5,210,192,000	0.352
			2024	0.09250	1,355,186,935	5,210,192,000	0.356
11	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	0.05256	172,248,454	870,701,000	0.266
			2022	0.05181	209,524,281	999,053,167	0.247
			2023	0.04476	211,604,532	999,053,167	0.211
			2024	0.04455	214,182,820	999,053,167	0.208
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	1.42967	1,201,559	1,129,925,000	1,344.439
			2022	2.48077	1,950,280	1,129,925,000	1,437.273
			2023	1.66386	1,788,540	1,129,925,000	1,051.155
			2024	1.65202	1,933,810	1,129,925,000	965.277
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	0.01990	98,920,656	5,000,000,000	1.006
			2022	0.02543	122,939,144	5,000,000,000	1.034
			2023	0.02387	139,340,657	5,000,000,000	0.857
			2024	0.03372	160,855,239	5,000,000,000	1.048
14	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	0.03266	1,229,336,461	25,136,231,252	0.668
			2022	0.06452	1,747,519,325	25,136,231,252	0.928
			2023	0.07492	2,027,595,992	25,136,231,252	0.929
			2024	0.06806	2,351,031,569	25,136,231,252	0.728

NO	KODE	PERUSAHAAN	TAHUN	VARIABEL KONTROL (K2)			
				Harga Pasar Persaham	Total Ekuitas	Jumlah Saham Beredar	MTBV (K3)
15	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	0.09636	3,284,924,558	24,241,508,196	0.711
			2022	0.11188	3,441,770,638	24,241,508,196	0.788
			2023	0.07330	3,540,403,379	24,241,508,196	0.502
			2024	0.09838	3,671,527,284	24,241,508,196	0.650
16	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	0.15208	260,223,000	1,008,605,000	0.589
			2022	0.27525	297,991,000	1,008,605,000	0.932
			2023	0.34056	235,630,000	1,008,605,000	1.458
			2024	1.70926	249,750,000	1,008,605,000	6.903
17	SOCI	Soeche Lines Tbk.	2021	0.01374	367,447,563	7,059,000,000	0.264
			2022	0.01151	374,069,573	7,059,000,000	0.217
			2023	0.01187	382,522,845	7,059,000,000	0.219
			2024	0.01033	400,391,395	7,059,000,000	0.182
18	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	0.05677	354,225,327	8,049,964,000	1.290
			2022	0.03846	423,710,293	8,068,271,058	0.732
			2023	0.01972	423,687,645	8,106,700,622	0.377
			2024	0.03527	436,660,230	8,167,826,937	0.660
19	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	0.02719	77,065,519	2,647,044,990	0.934
			2022	0.02937	88,830,704	2,633,300,000	0.871
			2023	0.04573	129,732,777	2,633,300,000	0.928
			2024	0.03960	148,995,066	3,507,420,034	0.932
20	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	0.01346	153,965,621	4,346,087,057	0.380
			2022	0.02072	155,608,427	4,358,812,057	0.580
			2023	0.02595	161,919,502	4,364,337,057	0.699
			2024	0.02722	192,218,460	4,366,087,057	0.618
21	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	0.06868	105,857,182	2,719,790,000	1.765
			2022	0.05594	172,199,605	2,719,790,000	0.884
			2023	0.06779	195,470,380	2,719,790,000	0.943
			2024	0.06249	221,634,328	2,719,790,000	0.767
22	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	0.02817	114,655,887	5,417,063,153	1.331
			2022	0.03846	145,875,110	5,417,063,153	1.428
			2023	0.03276	168,619,127	5,417,063,153	1.052
			2024	0.02487	158,242,564	5,417,063,153	0.851
23	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	2021	0.25930	402,617,027	3,555,560,000	2.290
			2022	0.44339	566,691,463	3,555,600,000	2.782
			2023	0.36650	585,662,403	3,555,600,000	2.225
			2024	0.32793	581,699,560	3,555,600,000	2.004

Lampiran 12 Hasil Uji Statistik dengan SPSS

a. Uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	92	.00	.84	.2471	.16506
POLCON	92	.00	1.00	.7174	.45273
BIND	92	.20	.80	.4554	.14401
LBSIZE	92	1.10	2.71	1.5921	.41907
DUALITY	92	.00	1.00	.3478	.47889
INSTOWN	92	.01	.95	.6764	.20716
BIGN	92	.00	1.00	.4565	.50084
LASSETS	92	14.33	22.79	20.3282	1.74340
DEBT	92	.04	.85	.4233	.18770
MTBV	92	.14	1437.27	54.1117	249.00014
Valid N (listwise)	92				

b. Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090

a. Dependent Variable: ETR

1) Uji asumsi klasik

- Uji asumsi klasik sebelum transformasi dan outlier
 - ✓ Uji normalitas sebelum transformasi dan outlier

Kolmogorov - Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13772950
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.081
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	<.001
	99% Confidence Interval Lower Bound	.000
	Upper Bound	.001

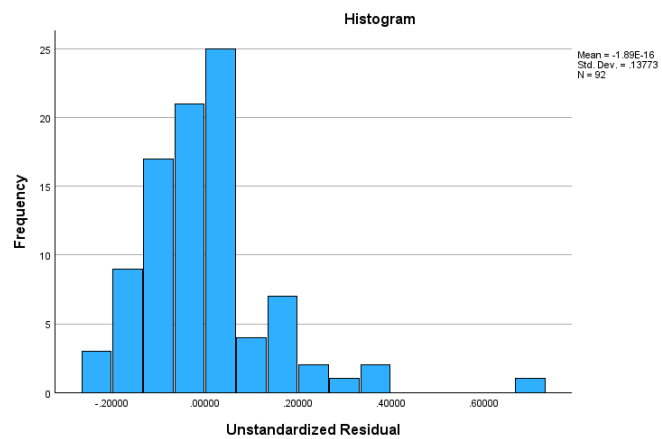
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

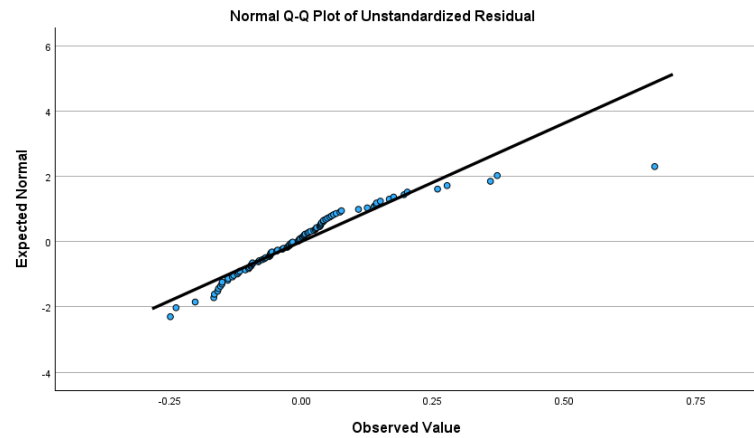
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Histogram



Grafik Normal Probability Plot



✓ Uji multikolinearitas sebelum transformasi dan outlier

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	-.409	.312		-1.311	.194	
	POLCON	.066	.044	.182	1.525	.131	.596 1.677
	BIND	.045	.122	.039	.368	.714	.755 1.325
	LBSIZE	-.043	.048	-.108	-.892	.375	.576 1.736
	DUALITY	.095	.037	.276	2.564	.012	.733 1.364
	INSTOWN	-.078	.081	-.098	-.968	.336	.821 1.218
	BIGN	-.061	.034	-.186	-1.809	.074	.802 1.247
	LASSETS	.030	.017	.321	1.789	.077	.264 3.790
	DEBT	.178	.103	.202	1.732	.087	.624 1.603
	MTBV	.000	.000	.303	1.775	.080	.291 3.438

a. Dependent Variable: ETR

✓ Uji autokorelasi sebelum transformasi dan outlier

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.551 ^a	.304	.227	.14509	1.648

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIGN, BIND, LBSIZE, DUALITY, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

- ✓ Uji heteroskedastisitas sebelum transformasi dan outlier

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.345	.199		1.730	.087
	POLCON	.026	.028	.119	.929	.355
	BIND	.098	.078	.143	1.257	.212
	LBSIZE	-.056	.031	-.240	-1.842	.069
	DUALITY	.051	.024	.247	2.140	.035
	INSTOWN	-.112	.052	-.237	-2.169	.033
	BIGN	-.053	.022	-.272	-2.462	.016
	LASSETS	-.008	.011	-.135	-.699	.487
	DEBT	.038	.066	.073	.586	.559
	MTBV	-2.702E-5	.000	-.069	-.373	.710

a. Dependent Variable: ABRES

- Uji asumsi klasik setelah transformasi dan outlier

- ✓ Uji normalitas setelah transformasi dan outlier

Kolmogorov – Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		90	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.11809030	
Most Extreme Differences	Absolute	.056	
	Positive	.056	
	Negative	-.053	
Test Statistic		.056	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.695	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.683
		Upper Bound	.707

a. Test distribution is Normal.

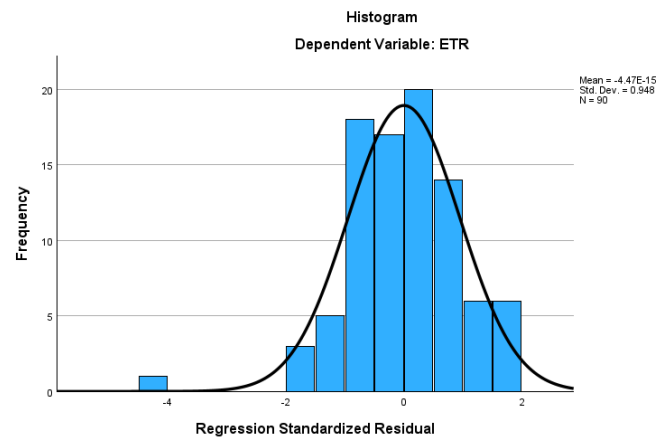
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

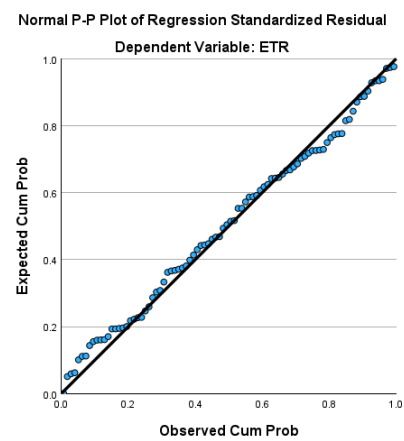
d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Histogram



Grafik Normal Probability Plot



✓ **Uji multikolinearitas setelah transformasi dan outlier**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089		
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016	.581	1.721
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330	.797	1.254
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296	.552	1.812
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005	.793	1.261
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658	.829	1.206
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706	.774	1.293
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101	.238	4.205
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003	.615	1.627
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090	.261	3.832

a. Dependent Variable: ETR

✓ **Uji autokorelasi setelah transformasi dan outlier**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.714 ^a	.510	.454	.12456	1.582

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

✓ **Uji heteroskedastisitas setelah transformasi dan outlier**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.769	.327		2.350	.021
	POLCON	.005	.023	.027	.199	.843
	BIND	-.051	.093	-.064	-.549	.585
	LBSIZE	-.033	.066	-.071	-.502	.617
	DUALITY	.021	.018	.132	1.122	.265
	INSTOWN	-.068	.054	-.144	-1.255	.213
	BIGN	-.013	.018	-.086	-.724	.471
	LASSETS	-.129	.080	-.344	-1.604	.113
	DEBT	.061	.065	.126	.942	.349
	MTBV	-.004	.002	-.403	-1.970	.052

a. Dependent Variable: ABSRES

2) Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.454	.12456

a. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

b. Dependent Variable: ETR

3) Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.290	9	.143	9.239	<.001 ^b
	Residual	1.241	80	.016		
	Total	2.531	89			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), MTBV, INSTOWN, DEBT, BIND, BIGN, DUALITY, LBSIZE, POLCON, LASSETS

4) Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.944	.548		-1.723	.089
	POLCON	.095	.038	.253	2.465	.016
	BIND	-.153	.156	-.086	-.981	.330
	LBSIZE	.116	.111	.111	1.053	.296
	DUALITY	.089	.031	.254	2.885	.005
	INSTOWN	.040	.090	.038	.445	.658
	BIGN	-.011	.030	-.034	-.379	.706
	LASSETS	.223	.134	.267	1.661	.101
	DEBT	.327	.108	.302	3.029	.003
	MTBV	.006	.004	.263	1.719	.090

a. Dependent Variable: ETR